KECAMATAN JOMBANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia serta ridhoNya, maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025 tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Kecamatan Jombang tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Jombang selama periode tahun anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Jombang Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029 karena tahun 2025 merupakan tahun peralihan.

Laporan Kinerja ini berisi informasi terkait pencapaian, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan kinerja ini juga memuat analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja ditahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian laporan kinerja ini. Kami pun menyadari bahwa laporan kinerja ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja yang telah dilakasanakan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Cilegon, 26 Januari 2026

CAMAT JOMBANG KOTA CILEGON

BURHANUDIN, SE
Pembina
NIP. 19800121 200312 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Ikhtisar Eksekutif		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	I.1 Latar Belakang	1
	I.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	I.3 Maksud dan Tujuan	3
	I.4 Sistematika Penulisan	3
	I.5 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan	5
	I.6 Gambaran Umum dan Potensi Kecamatan	8
	I.7 Isu Strategis	16
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	**18**
	II.1 Rencana Strategis (RENSTRA)	18
	II.2 Rencana Kerja (RENJA)	22
	II.3 Perjanjian Kinerja (PK)	23
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	**61**
	III.1 Capaian Kinerja Organisasi	**63**
	III.2 Realisasi Anggaran	**87**
BAB IV	**PENUTUP**	**125**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan Jombang	9
Tabel 1.2	Batas Wilayah Kecamatan Jombang	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Kecamatan Jombang Berdasarkan Status Kepegawaian	10
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Kecamatan Jombang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.5	Asset Kecamatan Jombang	13
Tabel 1.6	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	16
Tabel 2.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029	21
Tabel 2.3.1	Recana Kerja Kecamatan Jombang Tahun 2025	22
Tabel 2.3.1	Recana Kerja (Perubahan) Kecamatan Jombang Tahun 2025	23
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jombang Tahun 2025	24
Tabel 2.5	Progam dan Kegiatan Kecamatan Jombang Tahun 2025	25
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jombang Tahun 2025	42
Tabel 2.7	Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Jombang Tahun 2025	42
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	62
Tabel 3.2.1	Capaian Indikator Kinerja (Utama) Berdasarkan RENSTRA Tahun 2021-2026	64
Tabel 3.2.2	Capaian Indikator Kinerja (Utama) Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025-2029	70
Tabel 3.3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (RENSTRA 2021-2026)	73
Tabel 3.3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (RENSTRA 2025-2029)	76
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya (RENSTRA 2025-2029)	77
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional	79
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	81
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan	84
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	88
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	101
Tabel 3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	102

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKiIP) Kecamatan Jombang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Kecamatan Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik serta pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis, yaitu peralihan dari pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021-2026 menuju RENSTRA Tahun 2025-2029. Pada tahun transisi ini, pelaksanaan program dan kegiatan tetap mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan RENSTRA periode sebelumnya, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan terbaru.

Pada tahun 2025, Kecamatan Jombang telah menetapkan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025-2029. Sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama yang terukur sebagai dasar penilaian capaian kinerja organisasi.

*Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Jombang pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang **Sangat Baik** dengan rata-rata capaian kinerja **100,80% .** Dari indikator kinerja yang ditetapkan, sebagian besar telah mencapai atau melampaui target yang direncanakan. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, serta dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.*

Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Jombang Kota Cilegon pada tahun 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp 26.460.345.004,00,** *terealisasi sebesar* **Rp 24.979.046.865,00** *dengan tingkat realisasi sebesar* **94.40%.**

Realisasi anggaran tersebut telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan aparatur kelurahan, serta kegiatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor.

Meskipun secara umum kinerja menunjukkan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasaran pendukung, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Untuk itu, Kecamatan Jombang Kota Cilegon terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

LKjIP Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja sekaligus bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkaan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Jombang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian, permasalahan dan upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Jombang selama tahun 2025. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Pencapaian kinerja yang optimal merupakan salah satu elemen penting dalam

mendukung visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan selama periode ini sangat diperlukan untuk memastikan setiap aktivitas yang dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan organisasi secara keseluruhan.

Dengan demikian, laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi alat yang berguna bagi pimpinan untuk membuat keputusan yang lebih baik serta merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif dan efisien kedepannya.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Jombang Kota Cilegon tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127);
8) Peraturan Walikota Cilegon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan;

9) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10) Peraturan Walikota Cilegon Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2025 ini adalah ;

1) Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan;
3) Sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program dan kebijakan yang telah berjalan;
4) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Jombang untuk meningkatkan kinerjanya;

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2025, disusun dengan tata urut penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Stretagis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran srategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggungaan sumber daya;
7) Analisis program/ legiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B.Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunajan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

I.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Jombang Kota CIlegon merupakan Kecamatan Tipe B, yang memiliki tugas :

1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7) Membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan;
8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di Kecamatan
9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;
b) pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;
c) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
d) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Jombang :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jombang

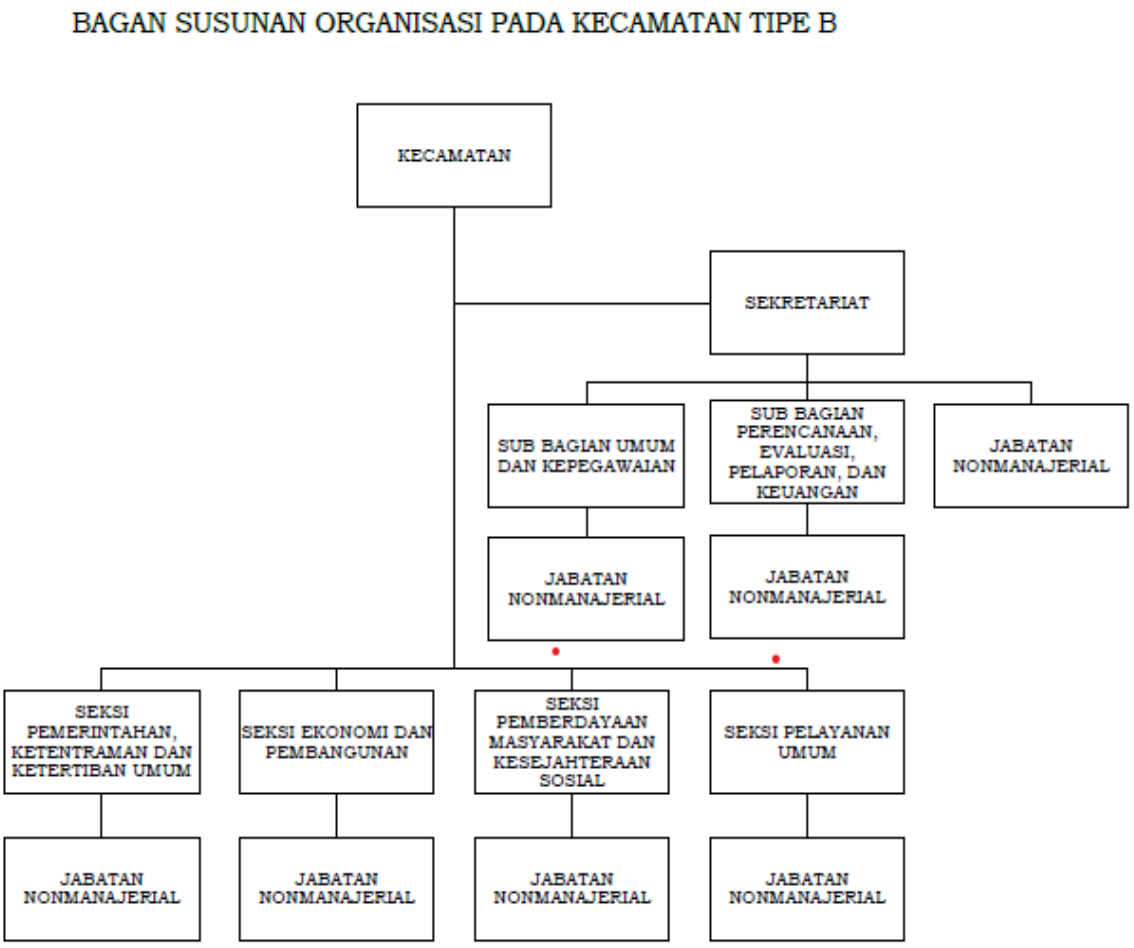

Sumber : Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Jombang juga membawahi Kelurahan-kelurahan yang ada di lingkup wilayah tugasnya. Kelurahan dipimpin oleh lurah dan bertanggung jawab kepada Camat dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekmat.

Kelurahan mempunyai tugas membantu Kecamatan dalam :

a) melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
b) melakukan pemberdayaan masyarakat;
c) melaksanakan pelayanan masyarakat;
d) memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e) memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas, Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut bagan struktur organisasi Kelurahan di Kecamatan Jombang :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kelurahan di Kecamatan Jombang

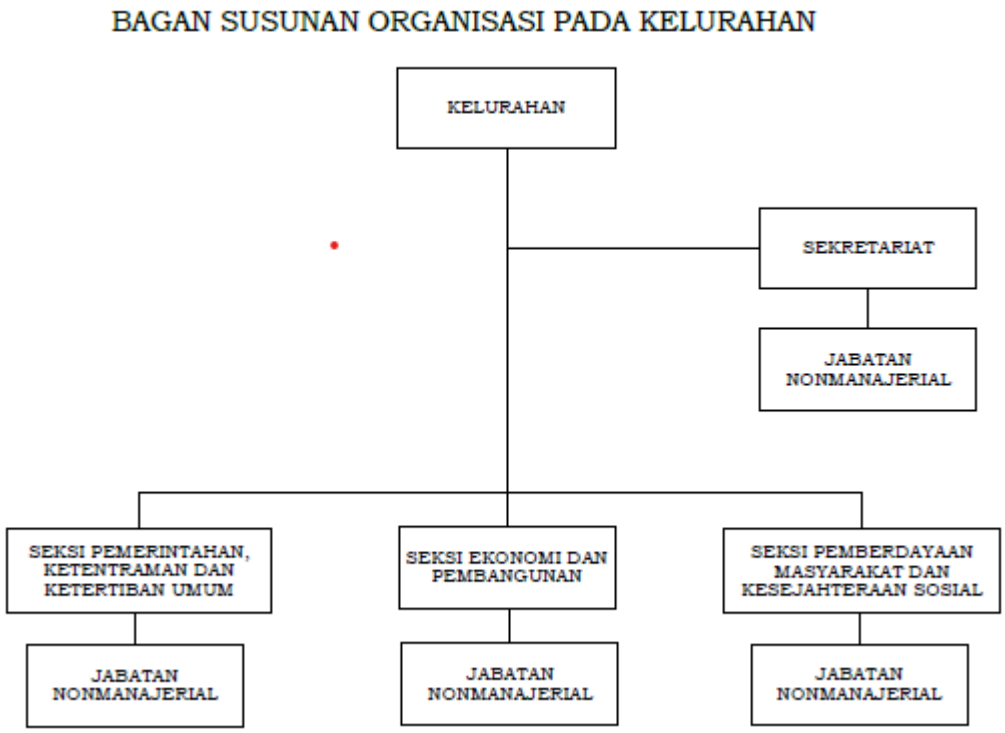

Sumber : Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2025

I.6 GAMBARAN UMUM DAN POTENSI KECAMATAN

Kecamatan Jombang merupakan salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada di wilayah Pemerintah Kota Cilegon, selain Kecamatan Cilegon, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, dan Kecamatan Pulomerak, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cilegon.

A. Kewilayahan

Kecamatan Jombang berada dibagian timur Kota Cilegon, terletak pada garis 5°52’24” – 6°04’07” LS dan 105°54’05” – 106°05’11” BT. Berdasarkan data

RTRW Kota Cilegon Tahun 2020-2040, Kecamatan Jombang memiliki luas wilayah 10,32 km2 dengan wilayah terkecil Kelurahan Jombang Wetan (1,37 km2) dan wilayah terluas Kelurahan Sukmajaya (3,02 km2), yang dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan Jombang

Unit Kerja	Luas Km2	Persentase terhadap Luas Kecamatan
Kelurahan Jombang Wetan	1,37	13,28%
Kelurahan Masigit	1,72	16,67%
Kelurahan Sukmajaya	3,02	29,26%
Kelurahan Panggung Rawi	2,48	24,03%
Kelurahan Gedong Dalem	1,73	16,76%
Kecamatan Jombang (Total)	**10,32**	**100%**

Sumber : Kecamatan Jombang Dalam Angka 2024, BPS

Secara administatif pemerintahan, Kecamatan Jombang terbagi menjadi 5 kelurahan, yaitu : ***Kelurahan Jombang Wetan, Kelurahan Masigit, Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Panggung Rawi*** *dan* ***Kelurahan Gedong Dalem,*** dengan Batas-batas wilayah Kecamatan Jombang sesuai Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon sebagai berikut :

Tabel 1.2
Batas Wilayah Kecamatan Jombang

Unit Kerja	Utara	Selatan	Timur	Barat
Kecamatan Jombang	Kec. Bojonegara Kab. Serang	Kec. Cilegon	Kec. Cibeber	Kec. Purwakarta
Kelurahan Jombang Wetan	Kel. Masigit dan Kel. Panggung Rawi	Kel. Ketileng dan Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon	Kel. Sukmajaya	Kel. Ciwaduk, Kel. Taman Baru dan Kel. Masigit
Kelurahan Masigit	Kel. Gedong Dalem	Kel. Ciwaduk, Kec. Cilegon	Kel. Jombang Wetan	Kel. Ramanuju, Kec. Purwakarta
Kelurahan Sukmajaya	Kel. Panggung Rawi	Kel. Ketileng. Kec. Cilegon	Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber	Kel. Jombang Wetan
Kelurahan Panggung Rawi	Kel. Gedong Dalem	Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber	Kel. Sukmajaya dan Kel. Jombang Wetan	Kel. Masigit
Kelurahan Gedong Dalem	Kel. Kertasana, Kec. Bojonegara	Kel. Panggung Rawi	Kel. Panggung Rawi	Kel. Purwakarta, Kec. Purwakarta

Sumber : Kecamatan Jombang Dalam Angka 2024, BPS

B. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jombang didukung 154 pegawai, yang terdiri dari 53 orang PNS, 13 orang PPPK, 15 orang TKK dan 73 THL yang tersebar di masing-masing unit kerja dan memiliki keterampilan yang memadai. Adapun komposisi pegawai Kecamatan Jombang berdasarkan status kepegawaian tersaji dalam tabel :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Kecamatan Jombang Berdasarkan Status Kepegawaian

Unit Kerja	Pejabat Esselon		JFT	PPPK	Pelaksana				Jumlah
	Gol IV	Gol III			Gol III	Gol II	TKK	THL	
Kecamatan Jombang	2	6	3	-	6	1	5	23	46
Kelurahan Jombang Wetan	-	5	2	2	1	-	3	12	25
Kelurahan Masigit	-	5	-	3	2	-	1	10	21
Kelurahan Sukmajaya	-	5	-	2	2	-	-	8	17
Kelurahan Panggung Rawi	-	5	-	3	1	-	4	9	22
Kelurahan Gedong Dalem	-	5	-	3	1	1	2	11	23
Jumlah Pegawai Kec.Jombang	**2**	**31**	**5**	**13**	**13**	**2**	**15**	**73**	**154**

Sumber : Data Kepegawaian,2025

Dari tabel diatas, terlihat bahwa status kepegawaian di Kecamatan Jombang didominasi oleh tenaga non ASN berstatus THL yaitu sebanyak 47% dari total jumlah pegawai Kecamatan Jombang, 34% pegawai berstatus PNS, 9,7% berstatus TKK dan 8,4% berstatus PPPK. Pada bulan Agustus 2025, terdapat penambahan 5 orang PPPK (dari semula berjumlah 8 orang menjadi 13 orang) yang tersebar pada 5 Kelurahan di wilayah Kecamatan Jombang.

Gambaran tentang kepegawaian pada Kecamatan Jombang Kota Cilegon menurut pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukan pada tabel:

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Kecamatan Jombang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Kec. Jombang		Kel. Jombang Wetan		Kel. Masigit		Kel. Sukmajaya		Kel. Panggung Rawi		Kel. Gedong Dalem		Jumlah
	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN	
S-2	4	-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	-	12
S-1	9	9	5	5	8	4	6	2	6	3	2	3	62
D-3	3	2	2		2	2	1		1	1	1	1	15
SMU/sederajat	2	14	2	7	-	3	-	5	-	9	2	8	52
SMP/sederajat	-	3	-	1	-	1	-		-	-	-	-	5
SD	-	2	-	2	-	1	-	2	-	-	-	1	8
Jumlah Pegawai Kec.Jombang	**18**	**30**	**10**	**15**	**9**	**11**	**8**	**9**	**9**	**13**	**9**	**13**	**154**

Sumber : Data Kepegawaian, Agustus 2025

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai Kecamatan Jombang memliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu SMU dan S1

Tingkat pendidikan pegawai memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja organisasi, terutama dalam hal peningkatan kompetensi, kemampuan organisasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan, penting untuk berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesionalitas mereka, sehingga Kecamatan dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, responsif dan berkualitas kepada masyarakat.

C. Asset (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Jombang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris dan fasilitas lainnya. Berikut sarana dan

prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Jombang:

Dengan luas tanah ± 6216 meterpersegi, Kecamatan Jombang memiliki bangunan dengan tata ruang yang memenuhi syarat untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Bangunan yang dimiliki : Bangunan utama (terdiri atas ruang pelayanan, ruangan camat, sekmat, kasi dan kasubag dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu terdapat juga ruang operator, ruang konsultasi serta ruang ramah ibu dan anak), Bangunan pendukung (terdiri dari gedung aula, musholla, gedung PKK, gedung posyantek, gedung arsip, serta terdapat 1 gedung tambahan yang dibangun di tahun 2023 yang diperuntukan untuk lembaga kemasyarakatan lainnya.

Selain itu juga terdapat lahan parkir yang luas dan area bermain anak di dalam dan luar gedung. Toilet yang disediakan juga telah responsive gender. Dalam mendukung mobilitas kegiatannya, Kecamatan Jombang juga memiliki kendaraan dinas yang terdiri atas

7 unit kendaraan roda 4, 11 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 3.

Kondisi asset Kecamatan Jombang Kota Cilegon dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Asset Kecamatan Jombang Kota Cilegon

No	Nama Barang	Kondisi	
		Baik	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	
4	Rumah Negara Golongan III Tipe D	1	
5	Gedung Pos Jaga Permanen	1	
6	Bangunan Rumah Lainnya	2	
7	Bangunan Parkir terbuka Semi Permanen	1	
8	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Lainnya	1	
9	Buku Produk Hukum	2	
10	Kendaraan Dinas Roda 4	7	
11	Kendaraan Dinas Roda 3	1	1
12	Kendaraan Dinas Roda 2	9	
13	Lemari Besi/Metal	14	
14	Lemari Kayu	3	
15	Lemari Kaca	2	1
16	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	
17	Roll O Pek	2	
18	Filling Besi/ Metal	15	1
19	Rak Besi/ Metal	1	
20	Meja Panjang	2	

No	Nama Barang	Kondisi	
		Baik	Rusak Berat
21	Meja ½ Biro	41	9
22	Meja Telepon		1
23	Meja Rapat	1	
24	Meja Kerja Kayu	4	
25	Meja Podium	1	
26	Kursi Rapat	89	140
27	Kursi Putar		
28	Kursi Lipat	25	
29	Kursi Staff	30	
30	Kursi Besi/Metal	11	2
31	Kursi Tamu	1	3
32	Sofa	2	
33	Lambang Garuda Pancasila	1	1
34	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	1	2
35	Background Foto KTP		1
36	Papan Nama Instansi	2	
37	Papan Pengumuman	1	
38	Figura Lambang Kota Cilegon	1	
39	Bingkai KIR		15
40	Bingkai	1	
21	Peta	1	
42	Mesin Ketik Manual Portablle		1
43	Mesin Ketik Elektronik	1	
44	Mesin Ketik Longewagen	1	
45	Mesin Hitung Elektronik/ Calculator	3	
46	Alat Penghancur Kertas	1	1
47	Faksimile		1
48	Brankas	1	
49	Komputer PC	10	6
50	Laptop	13	2
51	Printer	12	10
52	Scanner	1	
53	AC Split	15	8
53	AC Unit (AC Standing Floor)	2	
55	Televisi		4
56	Monitor		1
57	Running Text LED	1	1
58	Lemari Es	2	
59	Dispenser	2	
60	Kipas Angin		6
61	Amplifier		1
62	Loudspeaker (TOA)		4
63	Sound System	2	2
64	Wirelles		1
65	Micropohne		4
66	Tiang Mic Panjang		1
67	Compact Disk – DVD Player		1
68	Camera Vidio		4
69	Internet	1	

No	Nama Barang	Kondisi	
		Baik	Rusak Berat
70	CCTV	1	
71	Mesin Antrian	1	
72	Handphone	1	
73	Global Positioning Aysystem		1
74	Unit Power Supply		1
75	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	7
76	Radio Panggil /Handy Talky (HT)	3	2
77	Alat Pemadam/ Portable	8	
78	Mesin Potong Rumput		2
79	Mesin Penghisap Debu/Vaccum Cleaner		1
80	Pompa Air	1	1
81	Water Heater (Alat Pemanas)	1	1
82	Alat Hiasan		10
83	Tempat Tidur Kayu		2
84	Tirai Gordyn	4	
85	Kaca Hias	1	
86	Hechmachine Besar – Piper Cutter	1	
87	Bor Biopori		5
88	Dry Seal	1	
89	Alat Penyimpanan Lain-lain	1	
90	Alat Rumah Tangga Lain-lain		1
91	Sice	2	
92	Ayunan Super	1	
93	Komidi Putar	1	
94	Bola Dunia	1	
95	Jungkitan	1	
96	Gelas Putar	1	
97	Ayunan dan Perosotan	1	
98	Septic Tank	1	
	Jumlah Unit	**397**	**278**

Sumber : Buku Inventaris Gabungan, Laporan Asset 2024

Dari tabel di atas, Kecamatan Jombang memiliki 675 aset yang terdiri dari 397 aset dengan kondisi baik dan 278 dengan kondisi rusak berat yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sehingga perlu dilakukan pengadaan kembali peralatan dan mesin lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

I.7 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan utama atau tantangan prioritas yang perlu ditangani secara sistematis dalam periode perencanaan lima tahunan. Isu-isu ini muncul dari hasil evaluasi kinerja sebelumnya, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta pergeseran dinamika pembangunan daerah, nasional maupun global.

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang teoat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 1.6
Teknik Menyimpulkasn Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKATDAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Misi 4 : Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif	Belum optimalnya kualitas pelayanan Kecamatan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	Perkembangan teknologi yang akan menggantikan pekerjaan saat ini	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral	Tata kelola pemerintahan yang belum optimal dengan beberapa penanda capaian kinerja yaitu reformasi birokrasi yang berada pada kategori baik, sistem akuntabilitas kinerja pada kategori baik, pengelolaan keuangan daerah pada kategori perlu perbaikan, dan persepsi anti korupsi pada kategori rendah	1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur) 2)Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan 3)Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan di Wilayah Kecamatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKATDAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Misi 5 : Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan melestarikan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan.	Belum optimalnya pembangunan kewilayahan berkelanjutan	Belum optimalnya daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas kota	Dinamika geopolitik dan geoekonomi: eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru,	Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah	Banten: Penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang belum optimal Regional	
		Kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat yang masih rendah dengan tinggi tingkat kemiskinan dan pengangguran pasca COVID-19			Pembangunan ekonomi yang belum optimal	
		Kerentanan terhadap bencana alam yang cukup tinggi baik itu bencana alam maupun bencana kegagalan teknologi			Lingkungan hidup yang belum optimal ditandai dengan beberapa kondisi, yaitu daya dukung lingkungan yang masih rendah, kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, risiko bencana yang masih tinggi.	

Perumusan Isu strategis Kecamatan Jombang Kota Cilegon tahun 2025-2029 , ditinjau melalui; Permasalahan perangkat daerah; Isu strategis yang sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan isu strategis Kecamatan Jombang Kota Cilegon adalah :

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur)
2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
3) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan di Wilayah Kecamatan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam, yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Peran Kecamatan Jombang Kota Cilegon, diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Cilegon Terpilih tahun 2025-2029, yaitu : ***"MEWUJUDKAN CILEGON YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"*.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui misi :

1) Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas;
2) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif;
3) Meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas dan terjangkau;
4) Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif;
5) Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan melestarikan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan; dan
6) Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat

Dari keenam misi tersebut, Kecamatan Jombang Kota Cilegon mengampu **Misi 4 : Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif,** dan **Misi 5 : Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan melestarikan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan.**

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jombang Kota Cilegon merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2025-2029. Tujuan RENSTRA Kecamatan Jombang Kota Cilegon mengacu pada sasaran Misi ke-4 *(Mewujudkan Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif)* dan Misi ke-5 *(Meningkatkan Infrastruktur Perkotaan dan Kelestarian Lingkungan Hidup untuk Pembangunan yang Berkelanjutan)*.
Tujuan RENSTRA Kecamatan Jombang Kota Cilegon tahun 2025-2029 adalah **Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan**, dengan indikator Skor Penilaian Kecamatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kecamatan Jombang Kota Cilegon menetapkan 2 (dua) sasaran, yaitu :

1) Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.
2) Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan, dengan indikator Persentase Kelurahan Cepat Berkembang.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jombang Kota Cilegon tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JOMBANG											
- S.4.2 - Terwujudnya transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional - S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - S.5.5 - Meningkatnya keamanan dan kondusivitas daerah - S.5.6 - Terwujudnya pemerataan pembangunan potensi kewilayahan	Terwujudnya pelayanan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kecamatan		Skor Penilaian Kecamatan (poin)	0	70	71	72	73	74	75	
		Terwujudnya kinerja Kecamatan Jombang yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	60,1	61,3	62,52	63,77	65,05	66,35	67,68	
		Terwujudnya kualitas pembangunan Kecamatan yang berkelanjutan	Persentase Kelurahan cepat berkembang (%)	25	100	100	100	100	100	100	

Sumber : sipd.go.id/ RENSTRA Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate yang diemban. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dala penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025-2029

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR OUTCOME	CARA PENGHITUNGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan Jombang		Skor Penilaian Kecamatan (poin)	0	70	71	72	73	74	75	Skor penilaian kecamatan diperoleh dari hasil evaluasi kinerja kecamatan, meliputi Indikator Pelayanan Publik, Trantibum, Pemberdayaan, Kesejahteraan dan Kapasitas Aparatur.	Skor Kecamatan = $\sum(Bobot_i \times Nilai_i)/ \sum Bobot_i$ dengan keterangan: $Nilai_i$ = skor capaian indikator ke-i (skala bisa 0–100) $Bobot_i$ = bobot kepentingan indikator ke-i (jumlah total bobot = 100%) Range nilai : Range nilai : 91 - 100 -- Unggul 80 - 90,99 -- Sangat Baik 65 - 79,99 -- Baik 50,00 - 64,99 -- Cukup <50,00 -- Kurang
	Terwujudnya kinerja Kecamatan Jombang yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	60,1	61,3	62,52	63,77	65,05	66,35	67,68	Nilai Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh APIP setiap tahun dengan komponen pengungkit 60%, hasil 40% (Jika data tahun n belum tersedia maka menggunakan data tahun n-1)	Penjumlahan nilai komponen pengungkit 60%, hasil 40% berdasarkan kertas kerja yang dinilai oleh APIP
	Terwujudnya kualitas pembangunan Kecamatan yang berkelanjutan	Persentase Kelurahan cepat berkembang (%)	0	100	100	100	100	100	100	ukuran proporsi kelurahan yang mencapai kategori skor evaluasi minimal 351 berdasarkan tiga aspek kinerja (pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan) terhadap total kelurahan yang memenuhi syarat evaluasi	Rumus : (X/Y)*100% X = Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang di Wilayah Kecamatan Y = Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan

II.2 RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja tahun 2025 termuat dalam dokumen RENJA Perangkat Daerah tahu 2025. Berikut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jombang Tahun 2025 :

Tabel 2.3.1
Rencana Kerja Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan Layanan Pemerintahan			
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	73 Poin
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,87 Poin
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	90 Poin
Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat			
	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Ganggungan Trantibum yang Ditangani	100 Persen
		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	90 Persen
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	22.5 Persen

Sumber : RENJA Kecamatan Jombang Tahun 2025

Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan II, Kecamatan Jombang melakukan perubahan atas Rencana Kerja tahun yang dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.2
Rencana Kerja (Perubahan) Kecamatan Jombang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan Jombang		Skor Penilaian Kecamatan	70 Poin
	Terwujudnya kinerja Kecamatan Jombang yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	61,30 Poin
	Terwujudnya kualitas pembangunan Kecamatan yang berkelanjutan	Persentase Kelurahan cepat berkembang (%)	100 Persen

Sumber : RENJA Perubahan Kecamatan Jombang Tahun 2025

II.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayain dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2025 mengacu pada Dokumen RENSTRA tahun 2021-2026, Dokumen RENJA Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jombang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator KInerja	Satuan	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Peningkatan Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	79,87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	16.675.934.523
		Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Poin	73		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	Poin	90	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68.328.000
Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Ganggungan Trantibum yang Ditangani	Persen	100	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.551.142.900
		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	Persen	90	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	93.797.000
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	22,5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.675.934.523
					Jumlah	**30.500.455.573**

Sumber : Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jombang Tahun 2025

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Jombang Kota Cilegon yang tercantum dalam RENJA Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	KECAMATAN			**30,500,455,573**
	KECAMATAN JOMBANG			**13,955,997,923**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**13,395,781,423**
		Nilai LAKIP Perangkat Daerah	73 Poin	
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	79,87 Poin	
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**81,037,000**
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	45,705,000
	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7,590,000
	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6,576,000
	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	21,166,000
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**10,592,254,629**
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1736 Orang Bulan	10,513,054,629
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	65,940,000
	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	13,260,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**60,000,000**
	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	60,000,000
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**29,590,000**
	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	29,590,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Laporan**	**116,505,300**
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,129,000
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,105,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	53,688,000
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,378,300
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8,820,000
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4,385,000
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**41,402,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	22,896,000
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	18,506,000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**2,204,072,494**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,325,118
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,100,247,376
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	5 Laporan	270,920,000
	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	22,025,500
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	130,924,500
	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	104Unit	8,320,000
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9,650,000
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**68,328,000**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	90 Poin	
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 Laporan**	**25,363,000**
	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	25,363,000
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1 Laporan**	**42,965,000**
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	45,465,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**365,700,500**
		Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan	22.5 Persen	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3 Laporan**	**324,153,500**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	26,068,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	285,346,500
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	12,739,000
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**3 Laporan**	**41,547,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	26,535,000
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	9,757,000
	7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	5,255,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**32,391,000**
		Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100 Persen	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**2 Laporan**	**32,391,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21,485,000
	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	10,906,000
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**93,797,000**
		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara	90 Persen	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2 Laporan**	**93,797,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	8,135,000
	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	85,662,000
	KELURAHAN JOMBANG WETAN			**4,501,352,799**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**688,956,799**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**23,100,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23,100,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**35,077,000**
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,989,000
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,230,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,988,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,870,000
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5,000,000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**544,875,799**
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32,512,139
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	512,363,660
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**85,904,000**
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	52,212,900
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	14,480,000
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	19,211,100
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**2,113,045,000**
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**2,113,045,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	62,400,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	1,578,875,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	463,594,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	8,176,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**1,699,351,000**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**1,699,351,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	1,699,351,000
	KELURAHAN MASIGIT			**3,413,468,220**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**608,753,320**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**23,100,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23,100,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**45,517,900**
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,401,900

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,116,000
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7,000,000
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**500,000**
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500,000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**453,747,820**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,500,000
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40,603,465
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	410,644,355
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**85,887,600**
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	36,807,600
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	24,880,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24,200,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**1,621,881,000**
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**1,621,881,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	46,982,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	1,130,358,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/ Ormas	436,445,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	8,096,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**1,182,833,900**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**1,182,833,900**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1,182,833,900
	KELURAHAN SUKMAJAYA			**2,791,187,953**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**574,851,553**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**23,100,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23,100,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**30,322,850**
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,935,850
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,985,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,402,000
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4,000,000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**388,236,380**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31,000,000
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	356,236,380
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**133,192,323**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	51,451,600
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	81,740,723
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**1,350,676,400**
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**1,350,676,400**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	43,345,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	805,655,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	487,500,400
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	14,176,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**865,660,000**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**865,660,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	865,660,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	KELURAHAN PANGGUNG RAWI			**3,038,977,417**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**660,857,417**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**23,940,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23,940,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**24,497,000**
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3,016,000
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12,000,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7,581,000
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,900,000
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**10,697,500**
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10,697,500
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**459,117,574**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55,834,894
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	401,282,680
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**142,605,343**
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	46,455,343
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20,000,000
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76,150,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**1,401,911,000**
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**1,401,911,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	35,956,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	914,714,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	438,943,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 laporan	12,298,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**976,209,000**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**976,209,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	976,209,000
	KELURAHAN GEDONG DALEM			**2,799,471,260**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**746,734,010**
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**23,100,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23,100,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**44,948,000**
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	15,000,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	8,948,000
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7,000,000
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4,000,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**429,730,610**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,472,410
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	396,258,200
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**248,955,400**
	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	67,312,000
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5,993,400
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	175,650,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**1,258,039,250**
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**1,258,039,250**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50,480,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	691,096,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	506,429,250

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	10,034,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**794,698,000**
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**794,698,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	794,698,000

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

a) Terjadinya pergantian atau mutasi pejabat
b) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
c) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada bulan Oktober 2025, dilaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan strategi dan perubahan kebijakan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jombang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan Jombang		Skor Penilaian Kecamatan	Poin	70
	Terwujudnya kinerja Kecamatan Jombang yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (poin)	Poin	61,30
	Terwujudnya kualitas pembangunan Kecamatan yang berkelanjutan	Persentase Kelurahan cepat berkembang (%)	%	100

Sumber : Perubahan PK Kecamatan Jombang Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Jombang tahun 2025 sesudah dilakukan perubahan :

Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	KECAMATAN			**26,460,345,004**
	KECAMATAN JOMBANG			**14,262,955,601**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**13,975,811,601**
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	
		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	
	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	4 Laporan	**23,508,000**
	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15,336,000
	7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4,242,000
	7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	-
	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,930,000
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**11,520,467,317**
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1736 Orang Bulan	11,452,967,317
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	65,940,000
	7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1,560,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	1 Laporan	**60,000,000**
	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	60,000,000
	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**-**
	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**81,698,400**
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,129,000
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,105,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,622,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37,704,000
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13,138,400
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-
	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**43,688,000**
	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	43,688,000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**2,134,497,284**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102,601,818
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,028,395,466
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**111,952,600**
	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	22,025,500
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	83,927,100
	7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6,000,000
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**9,901,000**
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	91.8	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 Laporan**	**4,096,000**
	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	4,096,000
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1 Laporan**	**5,805,000**
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	5,805,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**188,951,000**
		Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	
		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3 Laporan**	**181,643,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	25,058,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	156,585,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	-
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**1 Laporan**	**7,308,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	7,308,000
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-
	7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**-**	**-**
		Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	-	**-**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-
	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**88,292,000**
		Persentase Instansi Vertikal dan Stakeholder di Wilayah Kecamatan yang Berkolaborasi dengan Program Pemerintah Daerah (Persen)	70	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**2 Laporan**	**88,292,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	2,630,000
	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	85,662,000
	KELURAHAN JOMBANG WETAN			**3,337,378,588**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**676,537,588**
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	
		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**11,550,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	11,550,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**28,707,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,989,000
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,230,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,988,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,650,000
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	850,000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**569,587,688**
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32,544,028
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	537,043,660
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**66,692,900**
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	52,212,900
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	14,480,000
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**1,007,793,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	
		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**1,007,793,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	40,178,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	638,667,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	328,084,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	864,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**1,653,048,000**
		Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**1,653,048,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	1,653,048,000
	KELURAHAN MASIGIT			**2,471,678,085**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**606,276,085**
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	
		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**5,800,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5,800,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**39,065,000**
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,391,000
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7,674,000
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7,000,000
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**499,723,485**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40,603,465
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	457,620,020
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**61,687,600**
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	36,807,600
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	24,880,000
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**731,283,000**
		Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	
		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**3 Laporan**	**731,283,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	40,102,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	450,000,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/ Ormas	241,181,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-	-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**1,134,119,000**
		Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**1,134,119,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	**1,134,119,000**
	KELURAHAN SUKMAJAYA			**2,047,784,703**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**537,493,703**
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	
		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**14,550,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14,550,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**23,675,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8,930,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,985,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,775,000
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	985,000
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2 Laporan	**366,076,380**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31,000,000
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	335,076,380
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2 Laporan	**133,192,323**
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	51,451,600
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	81,740,723
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**691,896,000**
		Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	4 Laporan	**691,896,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	38,652,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	322,040,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	331,204,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	-
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**818,395,000**
		Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**818,395,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	818,395,000
	KELURAHAN PANGGUNG RAWI			**2,244,679,417**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**658,210,417**
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	
		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**11,140,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11,140,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3 Laporan**	**18,800,000**
	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3,016,000
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10,000,000
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,784,000
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-
	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**9,637,500**
	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	9,637,500
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**478,787,574**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55,834,894

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	420,952,680
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**139,845,343**
	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	46,455,343
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	17,240,000
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76,150,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**650,845,000**
		Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	
		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**650,845,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	26,980,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	365,364,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	252,823,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 laporan	5,678,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**935,624,000**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**935,624,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	935,624,000
	KELURAHAN GEDONG DALEM			**2,095,868,610**
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**707,226,610**
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	
		Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	
		Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	
		Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	
		Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Laporan**	**11,550,000**
	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11,550,000
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**37,666,000**
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	15,000,000
	7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8,050,000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	7,616,000
	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	7,000,000
	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-
	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Laporan**	**449,070,610**
	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,000,000
	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30,472,410
	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	415,598,200
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**208,940,000**
	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	67,312,000
	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-
	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	141,628,000
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**634,321,000**
		Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**634,321,000**
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	32,927,000
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	280,316,000
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	317,324,000
	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	3,754,000
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**754,321,000**
		Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**754,321,000**
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	754,321,000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Jombang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jombang uyang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/ sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	x > 100%
2	Baik	80% ≤ x ≤ 100%
3	Cukup	60% ≤ x ≤ 80%
4	Kurang	20% < x ≤ 60%
5	Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Jombang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tahun 2025-2029 maupun RENJA Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Jombang tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang tahun 2025.

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

III.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jombang Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan merupakan tahun transisi perencanaan strategis, yaitu peralihan dari pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021-2026 menuju RENSTRA Tahun 2025-2029. Pada tahun transisi, Kecamatan Jombang Kota Cilegon melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku sebelumnya, sambil menyesuaikan diri dengan arah kebijakan dan sistem perencanaan baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tahun ini menjadi fase penting dalam menjaga kesinambungan kinerja oorganisasi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

III.1.1.1 Capaian Kinerja IKU Tahun 2025 yang Mengacu pada RENSTRA periode Tahun 2021-2026

Pada tahun transisi ini, Kecamatan Jombang Kota Cilegon melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengacu pada **Perjanjian Kinerja Tahun 2025** yang disusun berdasarkan RENSTRA periode sebelumnya, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan terbaru. Berikut hasil capaian kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2025 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang disusun berdasarkan **RENSTRA Kecamatan Jombang Tahun 2021-2026 :**

Tabel 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU RENSTRA Tahun 2021-2026)
Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Peningkatan Layanan Pemerintahan						
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Poin)	73	83,05	113,77%	Sangat Baik	LHE AKIP Tahun 2025
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	79,87	60,10	75,25%	Cukup	LHE PMPRB Tahun 2023
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan) (Poin)	90	91,81	102,01%	Sangat Baik	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025
	Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat						
	Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	100	100%	Sangat Baik	Laporan Penangan Gangguan Trantibum Tahun 2025
		Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara (Persen)	90	100	111,11%	Sangat Baik	Laporan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Tahun 2025
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan (Persen)	22,5	9,80	43,56%	Kurang	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Swadaya Masyarakat Tahun 2025
Capaian Kinerja					**90,95%**	**Baik**	

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Jombang Kota Cilegon pada tahun 2025 berdasarkan RENSTRA tahun 2021-2026 menunjukkan hasil yang **BAIK,** meskipun ada terdapat indikator yang belum mencapai target secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh dinamika perubahan kebijakan, penyesuaian indikator serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam masa transisi perencaanaan. Namun demikian, sebagian besar program dan kegiatan prioritas tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Upaya peningkatan akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur pada Perangkat Daerah Kecamatan Jombang Kota Cilegon selama tahun 2025 menunjukkan capaian yang **positif.** Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator, yaitu ***Nilai LAKIP Perangkat Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan).***

Nilai LAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 menunjukan tercapainya target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik** (realisasi 83,05 poin dari target 73 poin dengan capaian 113,77%). Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan serta evaluasi internal yang dilakukan secara konsisten. Kecamatan Jombang Kota Cilegon telah berupaya menyelaraskan sasaran strategis dengan program dan kegiatan, serta meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengembalian keputusan.

Sementara itu, **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** menunjukkan hasil yang **Cukup Baik** (realisasi 60,10 poin dari target 79,87 poin, dengan capaian 75,25%). Pelaksanan reformasi birokrasi telah diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif dan efisien melalui penataan kelembagaan, penyederhanaan prosedur kerja serta peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur. Meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, capaian indeks ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Selanjutnya, **Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)** berada pada kategori **Sangat Baik** (Realisasi 91,81% dari target 90% dengan capaian 102,01% **,** yang menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah dinilai baik oleh masyarakat. Capaian ini merupakan hasil upaya peningkatan standar pelayanan, transparansi prosedur, serta peningkatan sikap dan kompetensi aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja indikator tersebut menunjukkan bahwa sasaran ***Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur*** telah tercapai dengan baik. Kedepannya, Kecamatan Jombang Kota Cilegon akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja, percepatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2025, Kecamatan Jombang Kota Cilegon juga melaksanakan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan ketangguhan bencana, menjaga kondusifitas wilayah, serta memperkuat kerukunan umat beragama dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan. Capaian sasaran tersebut tercermin dari kinerja dua indikator, yaitu ***Persentase Gangguan Trantibum yang***

Ditangani dan ***Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara.*** Indikator **Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani** menunjukkan capaian yang **Sangat Baik** *(*Realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%). Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan aparatur dalam merespon setiap potensi gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan melalui kegiatan deteksi dini, patrol wilayah dan koordinasi lintas sektor, serta penanganan cepat dan terukur terhadap kejadian gangguan trantibum. Capaian indikator ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif bagi masyarakat.

Selanjutnya, indikator **Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara** menunjukkan hasil yang **Sangat Baik** (Realisasi 100% dari target 90% dengan capaian 111,11%). Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparatur yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan kesadaran bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara keseluruhan, capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa upaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon dalam menjaga stabilitas wilayah, memperkuat ketahanan sosial, serta menumbuhkan sikap toleransi dan pengamalan nilai-nilai luhur keagamaan telah berjalan baik. Kedepannya, upaya peningkatan kinerja akan terus difokuskan pada penguatan sinergi dan pemangku kepentingan, serta optimalisasi program pembinaa guna menjaga keberlanjutan kondusifitas wilayah dan ketangguhan sosial.

Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan pada tahun pelaporan mencapai 43,56% (realisasi 9,80% target 22,5%) masuk pada kategori **Kurang.** Artinya, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian indikator ini terutama dipengaruhi oleh adanya kebijakan rasionalisasi kegiatan pada sub kegiatan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah (pelaksanaan SALIRA hanya 40% di termin ke-1),** yang berdampak pada pengurangan jumlah dan skala kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi swadaya masyarakat secara langsung. Kebijakan rasionalisasi tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan yang semula direncanakan dengan pola partisipatif masyarakat dalam bentuk swadaya tenaga, pikiran, maupun dukungan material menjadi terbatas. Kondisi ini bukan disebabkan oleh rendahnya minat atau kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, melainkan sebagai konsekuensi dari penyesuaian kebijakan dan keterbatasan alokasi sumber daya pada tahun berjalan.

Meskipun demikian, Kecamatan Jombang Kota Cilegon tetap berupaya mempertahankan partisipasi masyarakat melalui kegiatan yang masih dapat dilaksanakan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, kegiatan gotong royong skala lingkungan, serta dukungan non-material dalam pelaksanaan pembangunan.

Perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
(RENSTRA 2021-2026)

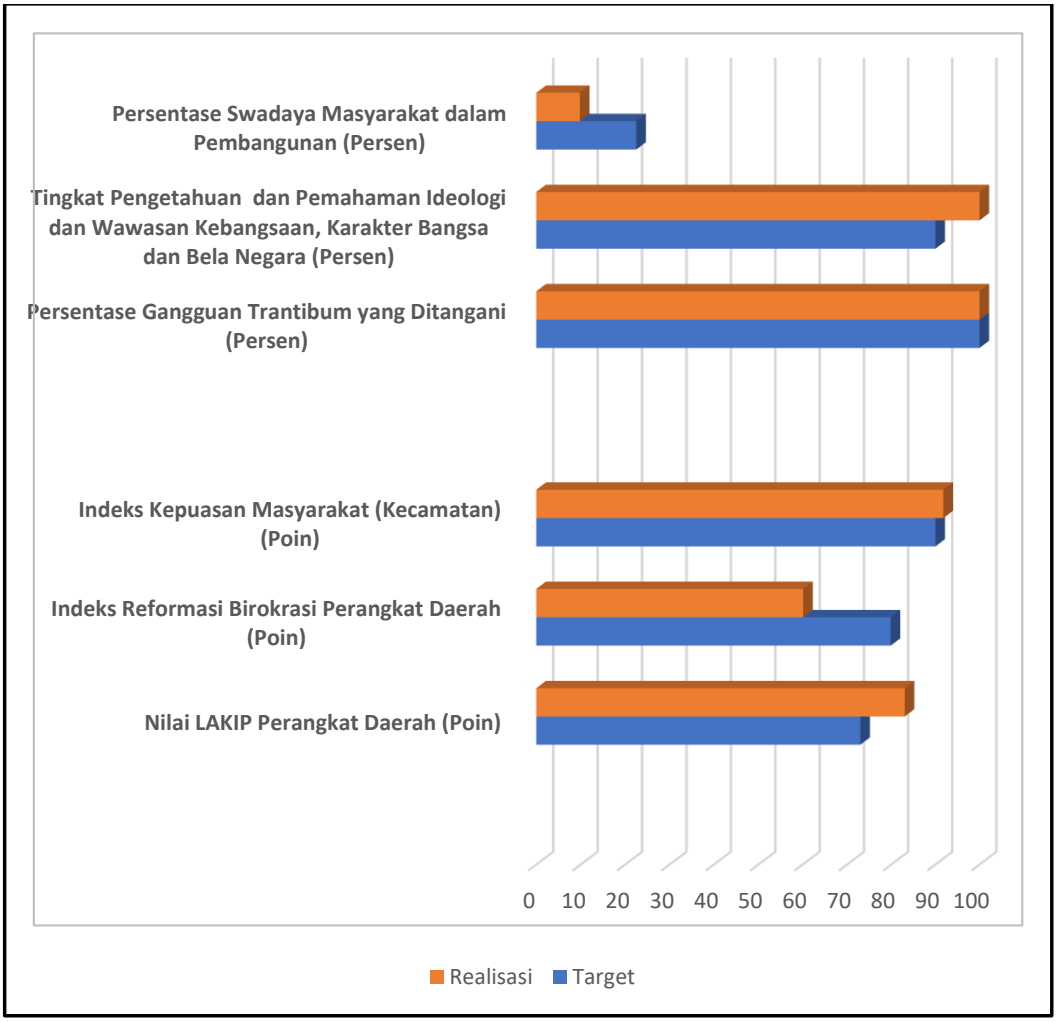

III.1.1.2 Capaian Kinerja IKU Tahun 2025 yang Mengacu pada RENSTRA periode Tahun 2025-2029

Hasil capaian kinerja Kecamatan Jombang Tahun 2025 yang mengacu pada **Perjanjian Kinerja dan IKU Tahun 2025** yang disusun berdasarkan **RENSTRA Kecamatan Jombang Tahun 2025-2029 :**

Tabel 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
(IKU RENSTRA Tahun 2025-2029)
Kecamatan Jombang Kota Cilegon Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	**Skor Penilaian Kecamatan (Poin)**	**70**	**73,05**	**104,36%**	**Sangat Baik**	**Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Tahun 2025 (Penilaian dari Bapperida)**
	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	61.3	60.10	98.04%	Baik	LHE PMPRB Tahun 2023 (Penilaian dari Inspektorat)
	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	100	100	100%	Sangat Baik	Laporan Nominatif Perkembangan Kelurahan Tahun 2015-2025 (Penilaian dari Bagian Pemerintahan)
Capaian Kinerja					**100,80%**	**Sangat Baik**	

Capaian kinerja IKU tahun 2025 pada periode RENSTRA Tahun 2025-2029 menunjukkan hasil yang **Sangat Baik.** Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian terhadap indikator kineja baru, baseline data yang baik meski masih dalam masa transisi perencanaan dan komitmen yang kuat dari berbagai unsur dalam pencapaian kinerja Kecamatan Jombang.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan di wilayah kecamatan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan

publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta dukungan terhadap pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Upaya tersebut tercermin dari capaian indikator **Skor Penilaian Kecamatan** pada tahun 2025 dicapai sebesar 104,36% (realisasi 73,05 poin dengan target 70 poin), dengan kategori **Sangat Baik.** Capaian ini menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jombang Kota Cilegon secara umum telah berjalan dengan baik, khususnya dalam aspek pelayanan administrasi pemerintahan, koordinasi pembangunan wilayah serta pembinaan terhadap kelurahan. Capaian skor tersebut didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penerapan standar pelayanan yang lebih tertib dan transparan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan. Selain itu, peran kecamatan dalam melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembangunan turut berkontribusi terhadap terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, antara lain peningkatan inovasi pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas aparatur. Evaluasi atas capaian indikator ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut guna meningkatkan kinerja kecamatan pada periode berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan kinerja kecamatan yang akuntabel dan profesional, Kecamatan Jombang Kota Cilegon terus melaksanakan upaya reformasi birokrasi secara terarah dan berkelanjutan. Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut tercermin

dari capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, pada RENSTRA 2025-2029 ini Kecamatan Jombang Kota Cilegon menetapkan target sebesar 61,30% (lebih kecil dari tahun sebelumnya). Dengan realisasi sebesar 61,10% (karena pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, maka yang digunakan adalah hasil penilaian/LHE tahun terakhir yaitu tahun 2023), maka capaiannya sebesar 98,04%, masuk kategori **Baik.** Meskipun capaian Indeks Reformasi Birokrasi telah menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, antara lain penguatan inovasi pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan budaya kinerja di lingkungan kecamatan. Evaluasi atas capaian indikator ini akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan penguatan reformasi birokrasi pada periode berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan kualitas pembangunan kecamatan yang berkelanjutan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon melaksanakan berbagai upaya pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pembangunan wilayah secara terpadu dan berkesinambungan. Upaya tersebut tercermin dari capaian indikator **persentase kelurahan cepat berkembang**.

Persentase kelurahan cepat berkembang pada tahun 2025 mencapai 100% artinya dalam kategori **Sangat Baik**, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Capaian ini

menggambarkan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemerataan antarwilayah. Capaian indikator ini didukung oleh penguatan peran kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan, peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, serta sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan berwawasan lingkungan turut mendorong peningkatan status perkembangan kelurahan.

Perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
(RENSTRA 2025-2029)

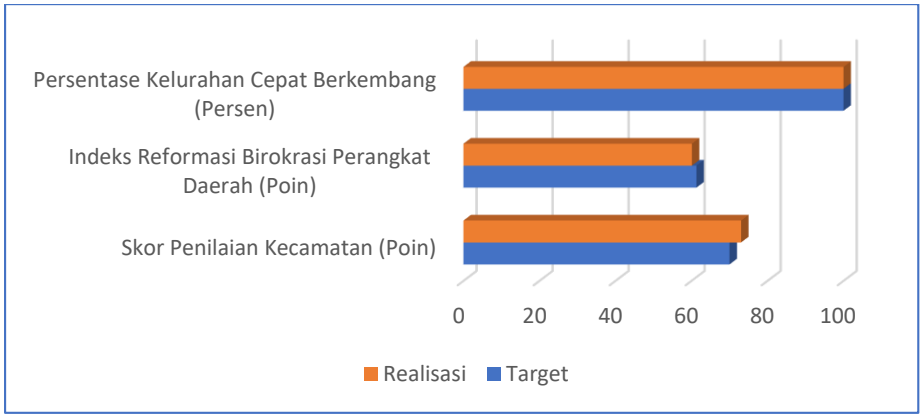

Dari kesemua indikator terlihat masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Ke depannya, Kecamatan Jombang akan memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program secara lebih fokus dan terarah, serta meningkatkan koordinasi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal guna memastikan seluruh indikator kinerja sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

III..2.2 **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya baik yang mengacu pada RENSTRA tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun Sebelumnya
(RENSTRA 2021-2026)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Layanan Pemerintahan							
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Poin)	72	83,52	116%	73	83,05	113,77%
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	79,87	60,10	75,25%	79,87	60,10	75,25%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan) (Poin)	90	91,76	101,96%	90	91,81	102,01%
Peningkatan Kualitas Pembangunan dan							

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Kualitas Hidup Masyarakat							
Mewujudkan Ketangguhan Bencana, Kondusifitas Wilayah, Kerukunan Umat Beragama dan Nilai-nilai Luhur Keagamaan	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	100	100%	100	100	100%
	Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Bela Negara (Persen)	80	90	112,50%	90	100	111,11%
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan (Persen)	20	0.4	2,00%	22,5	9,80	43,56%

Berdasarkan hasil diatas, capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 secara umum menunjukkan kecenderungan **meningkat** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya efektifitas perencnaan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan koordinasi antar unit kerja. Selain itu penerapan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya juga turut berkontribusi dalam peningkatan capaian indikator pada tahun 2025.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya relative stagnan atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan adanya kendala eksternal, keterbatasan sumber daya, serta perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya berdasarkan RENSTRA tahun 2025-2029 tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun Sebelumnya
(RENSTRA 2025-2029)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	Skor Penilaian Kecamatan (Poin)	N/A	N/A	-	70	73,05	104,36%
Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	N/A	N/A	-	61.3	60.1	98.04%
Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	N/A	N/A	-	100	100	100%

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, seiring dengan adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan penetapan indikator kinerja. Perubahan tersebut menyebabkan perbedaan indikator sasaran yang digunakan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan adanya perbedaan indikator tersebut, capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan indikator yang digunakan memiliki definisi, satuan ukur, serta target kinerja yang berbeda, sehingga perbandingan kuantitatif tidak mencerminkan kondisi kinerja yang sebenarnya. Meskipun demikian, pengukuran kinerja tahun 2025 tetap dilaksanakan sebagai dasar evaluasi atas pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun berjalan. Hasil pengukuran ini menjadi baseline kinerja bagi pelaksanaan pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya dengan indikator yang telah diselaraskan. Ke depan, Kecamatan Jombang Kota Cilegon akan menjaga konsistensi indikator kinerja agar hasil pengukuran kinerja dapat dibandingkan secara berkelanjutan serta digunakan secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas.

III.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja tahun pelaporan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk mengetahui tingkat kemajuan pencapaian sasaran strategis instansi sampai dengan tahun pelaporan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan kinerja jangka menengah dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir RENSTRA tahun 2025-2029 :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Tahun Sebelumnya
(RENSTRA 2025-2029)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5=3/4*100
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	Skor Penilaian Kecamatan (Poin)	73,05	74	98,72%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	60.1	66.35	90,58%
Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	100	100	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dan berada pada jalur pencapaian target akhir Renstra. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai atau mendekati target akhir Renstra, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, penyesuaian kebijakan, serta dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan. Terhadap indikator-indikator tersebut, Kecamatan Jombang Kota telah melakukan evaluasi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mendorong percepatan pencapaian target akhir Renstra.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja hingga tahun 2025, Kecamatan Jombang Kota Cilegon optimis bahwa target akhir Renstra dapat tercapai melalui penguatan perencanaan kinerja, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya pada periode selanjutnya.

III.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja kecamatan tahun 2024 dengan standar nasional memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi oleh kecamatan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Jika terdapat gap antara keduanya, maka langkah-langkah perbaikan perlu segera diambil untuk mencapai target-target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5=4/5*100
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	Skor Penilaian Kecamatan (Poin)	73,05	92,52	78,96%
Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	60.1	86,39	69,57%
Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	100	36,03	

Tidak ada angka standar nasional baku yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai skor penilaian kecamatan yang berlaku di seluruh Indonesia. Penilaian kinerja kecamatan ditentukan oleh pedoman atau peraturan daerah masing-masing, sehingga standar skor bisa berbeda antar daerah. Namun, terdapat penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan pada kota/kabupaten lain yang mungkin dapat dijadikan pembanding. Ditahun 2024, **Kecamatan Kedungjajang Kab. Lumajang** memperoleh nilai SKK sebesar 92,52, yang menjadikannya sebagai Kecamatan Terbaik di Kabupaten tersebut. Jika

dibandingkan dengan realisasi Kecamatan Jombang sebesar 73,05 maka capaian kinerja Kecamatan Jombang Kota Cilegon jika dibandingkan dengan Kecamatan Kedungjajang Kab. Lumajang adalah sebesar **78,96%**

Nilai IRB merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui mekanisme evaluasi internal hingga eksternal berdasarkan Peraturan Menteri PANRB dan pedoman evaluasi nasional. Sebagai pembanding terkait Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, **Kota Surabaya** memperoleh nilai IRB **86,39 poin.** Capaian ini menunjukkan bahwa Surabaya menunjukkan kinerja tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang unggul, termasuk dalam SAKIP, Indeks Berakhlak, Survei Kepuasan Masyarakat, dan sistem merit dalam birokrasi. Jika dibandingkan dengan realisasi Kecamatan Jombang tahun 2025 sebesar **60,10 poin** maka capaiannya 69.57%.

Suatu kelurahan dikategorikan Cepat Berkembang apabila mendapatkan nilai total perkembangan >351 dalam evaluasi perkembangan desa/kelurahan sesuai Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Permendagri 81/2015). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penetapan Kategori Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2025, dari 8.498 kelurahan secara nasional yang telah menginput data, 3.062 kelurahan dikategorikan sebagai **Cepat Berkembang** atau sekitar **36,03%** dari yang dinilai. Dan di Kecamatan Jombang Kota Cilegon sendiri, 5 kelurahan yang ada di wilayah kecamatan ini **100%** memperoleh predikat **Kelurahan Cepat Berkembang.**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, realisasi kinerja Kecamatan Jombang Kota Cilegon menunjukkan pencapaian yang masih lebih rendah dibanding instansi sejenis lainnya. Hasil ini terlihat pada beberapa indikator utama, termasuk efektivitas pelayanan publik, tingkat pencapaian program,

serta sinergi antar unit kerja. Perbedaan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang belum optimal, kompleksitas program yang dijalankan, serta tantangan dalam koordinasi lintas sektor. Kondisi ini menandakan bahwa perlu upaya perbaikan yang lebih fokus dan terencana agar capaian kinerja dapat meningkat dan sejajar dengan instansi lain.Sebagai langkah tindak lanjut, instansi telah merumuskan strategi perbaikan, meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan, penguatan koordinasi antar unit kerja, serta optimalisasi penggunaan anggaran dan sarana prasarana. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian target program pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan pendekatan yang sistematis dan terukur, Kecamatan Jombang Kota Cilegon berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya hingga mencapai standar nasional atau setara dengan instansi lain, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional dan responsif kepada masyarakat.

III.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dalam mengidentifikasi penyebab keberhasilan, kegagalan, atau fluktuasi kinerja kecamatan, penting untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kebijakan di tingkat kecamatan. Selain itu, setelah mengetahui penyebabnya, langkah-langkah solusi yang tepat perlu diusulkan untuk memperbaiki atau memperkuat kinerja yang ada.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja sasaran dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	**Skor Penilaian Kecamatan (Poin)**	**70**	**73,05**	**104,36%**	**Analisis Keberhasilan :** 1. Kepatuhan adminsitrasi pelaporan 2. Dukungan pimpinan kecamatan 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Koordinasi internal yang baik **Aspek yang masih perlu ditingkatkan :** 1. Pembinaan kelurahan belum maksimal 2. Pemahaman indikator belum seragam (Keterbatasan SDM yang berkompeten) 3. Sarana dan prasarana yang belum optimal 4. Koordinasi dengan ekternal belum optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM 2. Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana 3. Penguatan pembinaan kelurahan 4. Optimalisasi manajemen kinerja
	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	61.3	60.10	98.04%	**Analisis Keberhasilan :** 1. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan RB 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik **Aspek yang masih perlu ditingkatkan :** 1. Pemenuhan eviden RB belum optimal	1. Optimalisasi pemenuhan eviden RB 2. Penguatan manajemen RB 3. Peningkatan kapasitas dan pemahaman SDM 4. Penguatan monitoring dan evaluasi 5. Peningkatan integritas

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						2. Implementasi area perubahan belum merata 3. Pemahaman RB masih terbatas 4. Monitoring dan Evaluasi belum maksimal	
	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	100	100	100%	**Analisis Keberhasilan :** 1. Dukungan kebijakan dan pembinaan dari kecamatan 2. Partisipasi Masyarakat yang cukup baik 3. Pemanfaatan dana dan program pembangunan lebih efektif **Aspek yang masih perlu ditingkatkan :** 1. Keterbatasan Sumber daya 2. Kualitas perencanaan dan inovasi belum merata 3. Monitoring dan Evaluasi yang belum optimal	1. Peningkatan kapasitas SDM kelurahan 2. Optimalisasi perencanaan dan program 3. Penguatan monitoring dan evaluasi

Dengan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan capaian indikator kinerja pada periode berikutnya dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

III.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja di tingkat kecamatan sangat bergantung pada efektivitas dan keberhasilan berbagai program atau kegiatan yang dilaksanakan. Program yang baik harus dapat menunjang tujuan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sedangkan kegagalan dalam pelaksanaan program dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian kinerja yang diinginkan. Berikut adalah analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di kecamatan:

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	**Skor Penilaian Kecamatan (Poin)**	**104,36%**				
	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	98.04%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,34%	Menunjang
					Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
					Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan	101,97%	Menunjang
					Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah	133,33%	Menunjang
					Indeks Pelayanan Publik	69,40%	Menunjang
					Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah	100%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	91,81%	Menunjang
	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang (Persen)	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lingkungan (RW) yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	100%	Menunjang
					Persentase Lingkungan (RW) yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	123,81%	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100%	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase instansi vertikal dan stakeholder di wilayah kecamatan yang berkolaborasi dengan program pemerintah daerah	111,11%	Menunjang

Pencapaian pernyataan kinerja pada periode 2025 didukung oleh pelaksanaan beberapa program yang relevan dan selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah. Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta didukung oleh ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Kesesuaian program dengan sasaran kinerja
2) Pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sesuai rencana
3) Dukungan anggaran dan sumber daya
4) Koordinasi dan sinergi yang baik

Meskipun sebagian program telah memberikan kontribusi positif, masih terdapat beberapa program yang belum dapat dilaksanakan secara optimal

sehingga berdampak pada belum tercapainya pernyataan kinerja secara maksimal.

Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan antara lain:

1) Pelaksanaan kegiatan belum optimal
2) Keterbatasan sumber daya
3) Keterbatasan anggaran, SDM, serta sarana dan prasarana menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja.
5) Perubahan kebijakan dan kondisi eksternal
6) Monitoring dan evaluasi kegiatan belum optimal

Sebagai upaya peningkatan pencapaian pernyataan kinerja pada periode berikutnya, dilakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1) Penyempurnaan perencanaan program
2) Optimalisasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
3) Penguatan koordinasi dan sinergi
4) Peningkatan monitoring dan evaluasi

Secara umum, pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh pelaksanaan program yang relevan dan terarah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program yang menyebabkan pencapaian kinerja belum optimal. Melalui pelaksanaan upaya perbaikan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan pencapaian pernyataan kinerja pada periode berikutnya dapat meningkat.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran adalah proses di mana dana yang dialokasikan dalam anggaran tahunan digunakan untuk menjalankan berbagai program atau kegiatan di tingkat kecamatan. Pemahaman yang jelas mengenai realisasi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Jombang Kota Cilegon melaksanakan program dan kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan pernyataan kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

III.2.1 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Secara umum, capaian realisasi anggaran program dan kegiatan menunjukkan hasil **Baik**. Hal ini tercermin dari perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun anggaran.

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar **Rp 26.460.345.004,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Rupiah*).** Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar **Rp 24.979.046.865,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)*** atau sebesar **94,40%** dari total anggaran yang ditetapkan.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan, baik kegiatan yang

bersifat operasional maupun kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja.

Capaian anggaran Kecamatan Jombang yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
KECAMATAN	26,460,345,004	24,979,046,865	94.40%
KECAMATAN JOMBANG	14,262,955,601	13,273,808,100	93.06%
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**13,975,811,601**	**12,988,292,800**	92.93%
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**23,508,000**	**23,508,000**	**100.00%**
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,336,000	5,336,000	100.00%
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,242,000	4,242,000	100.00%
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	0.00%
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,930,000	3,930,000	100.00%
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**11,520,467,317**	**10,818,856,199**	93.91%
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,452,967,317	10,751,356,199	93.87%
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65,940,000	65,940,000	100.00%
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,560,000	1,560,000	100.00%
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**60,000,000**	**60,000,000**	100.00%
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60,000,000	60,000,000	100.00%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**-**	**-**	**0.00%**
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0.00%
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**81,698,400**	**81,698,400**	**100.00%**
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,129,000	6,129,000	100.00%
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,105,000	18,105,000	100.00%
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,622,000	6,622,000	100.00%
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37,704,000	37,704,000	100.00%
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,138,400	13,138,400	100.00%
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**43,688,000**	**31,928,000**	**73.08%**
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	-	-	-
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,688,000	1,928,000	73.08%
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2,134,497,284**	**1,893,899,067**	**88.73%**
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000	3,500,000	100.00%
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102,601,818	72,627,017	70.79%
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,028,395,466	,817,772,050	89.62%
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**111,952,600**	**78,403,134**	**70.03%**

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,025,500	17,617,000	79.98%
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83,927,100	56,536,134	67.36%
7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	-	-	-
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,000,000	4,250,000	70.83%
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**9,901,000**	**9,842,300**	**99.41%**
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**4,096,000**	**4,095,000**	**99.98%**
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,096,000	4,095,000	99.98%
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**5,805,000**	**5,747,300**	99.01%
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5,805,000	5,747,300	99.01%
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**188,951,000**	**188,381,000**	99.70%
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**181,643,000**	**181,073,000**	99.69%
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25,058,000	25,058,000	100.00%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156,585,000	156,015,000	99.64%
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	-		-
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**7,308,000**	**7,308,000**	100.00%
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7,308,000	7,308,000	100.00%
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	-
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**-**	**-**	-
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**-**	**-**	-
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**88,292,000**	**87,292,000**	98.87%
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**88,292,000**	**87,292,000**	98.87%
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2,630,000	1,630,000	61.98%
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	85,662,000	5,662,000	100.00%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
KELURAHAN JOMBANG WETAN	**3,337,378,588**	**3,222,233,268**	**96.55%**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**676,537,588**	**631,376,428**	**93.32%**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**11,550,000**	**11,550,000**	**100.00%**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,550,000	11,550,000	100.00%
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**28,707,000**	**28,690,000**	**99.94%**
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,989,000	6,986,000	99.96%
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,230,000	10,217,000	99.87%
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,988,000	4,988,000	100.00%
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,650,000	5,649,000	99.98%
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	850,000	850,000	100.00%
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**569,587,688**	**528,593,928**	**92.80%**
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32,544,028	24,014,004	73.79%
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	537,043,660	504,579,924	93.96%
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**66,692,900**	**62,542,500**	**93.78%**
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,212,900	48,083,500	92.09%
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,480,000	14,459,000	99.85%
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0.00%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1,007,793,000**	**949,234,840**	**94.19%**
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**1,007,793,000**	**949,234,840**	**94.19%**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40,178,000	37,433,000	93.17%
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	638,667,000	631,100,000	98.82%
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	328,084,000	280,146,840	85.39%
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	864,000	555,000	64.24%
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**1,653,048,000**	**1,641,622,000**	**99.31%**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**1,653,048,000**	**1,641,622,000**	**99.31%**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1,653,048,000	1,641,622,000	99.31%
KELURAHAN MASIGIT	**2,471,678,085**	**2,378,034,161**	**96.21%**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**606,276,085**	**536,319,161**	**88.46%**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5,800,000**	**5,800,000**	**100.00%**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,800,000	5,800,000	100.00%
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**39,065,000**	**37,051,000**	**94.84%**
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,391,000	3,391,000	100.00%
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	14,345,000	95.63%
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,000,000	5,659,000	94.32%
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,674,000	6,942,000	90.46%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,000,000	6,714,000	95.91%
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	**0.00%**
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0.00%
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**499,723,485**	**440,720,561**	**88.19%**
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,500,000	100.00%
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,603,465	22,148,559	54.55%
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457,620,020	17,072,002	91.14%
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**61,687,600**	**52,747,600**	**85.51%**
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,807,600	27,867,600	75.71%
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,880,000	24,880,000	100.00%
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0.00%
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**731,283,000**	**712,885,000**	**97.48%**
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**731,283,000**	**712,885,000**	**97.48%**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40,102,000	36,120,000	90.07%
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450,000,000	445,180,000	98.93%
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	241,181,000	231,585,000	96.02%
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	-		0.00%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**1,134,119,000**	**1,128,830,000**	**99.53%**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**1,134,119,000**	**1,128,830,000**	**99.53%**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**1,134,119,000**	**1,128,830,000**	**99.53%**
KELURAHAN SUKMAJAYA	**2,047,784,703**	**2,016,838,766**	**98.49%**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**537,493,703**	**514,255,766**	**95.68%**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**14,550,000**	**14,550,000**	**100.00%**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,550,000	14,550,000	100.00%
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**23,675,000**	**23,675,000**	**100.00%**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,930,000	8,930,000	100.00%
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,985,000	3,985,000	100.00%
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,775,000	9,775,000	100.00%
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	985,000	985,000	100.00%
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**366,076,380**	**348,728,166**	**95.26%**
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	0.00%
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,000,000	29,023,900	93.63%
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	335,076,380	319,704,266	95.41%
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**133,192,323**	**127,302,600**	**95.58%**

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,451,600	45,951,600	89.31%
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81,740,723	81,351,000	99.52%
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**691,896,000**	**684,188,000**	**98.89%**
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**691,896,000**	**684,188,000**	**98.89%**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	38,652,000	37,452,000	96.90%
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	322,040,000	317,815,000	98.69%
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	331,204,000	328,921,000	99.31%
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	-		0.00%
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**818,395,000**	**818,395,000**	**100.00%**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**818,395,000**	**818,395,000**	**100.00%**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	818,395,000	818,395,000	100.00%
KELURAHAN PANGGUNG RAWI	**2,244,679,417**	**2,168,962,283**	**96.63%**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**658,210,417**	**595,565,283**	**90.48%**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**11,140,000**	**11,140,000**	**100.00%**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,140,000	11,140,000	100.00%
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**18,800,000**	**13,883,000**	**73.85%**
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,016,000	3,016,000	100.00%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000	6,954,000	69.54%
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,784,000	3,913,000	67.65%
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0.00%
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**9,637,500**	**9,637,000**	**99.99%**
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,637,500	9,637,000	99.99%
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**478,787,574**	**439,591,283**	**91.81%**
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	1,740,000	87.00%
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,834,894	50,603,623	90.63%
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420,952,680	387,247,660	91.99%
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**139,845,343**	**121,314,000**	**86.75%**
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,455,343	32,779,000	70.56%
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,240,000	14,559,000	84.45%
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76,150,000	73,976,000	97.15%
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**650,845,000**	**640,023,000**	**98.34%**
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**650,845,000**	**640,023,000**	**98.34%**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26,980,000	6,980,000	100.00%
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	365,364,000	62,440,000	99.20%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	252,823,000	245,408,000	97.07%
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	5,678,000	5,195,000	91.49%
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**935,624,000**	**933,374,000**	**99.76%**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**935,624,000**	**933,374,000**	**99.76%**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	935,624,000	933,374,000	99.76%
KELURAHAN GEDONG DALEM	**2,095,868,610**	**1,919,170,287**	**91.57%**
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**707,226,610**	**575,199,707**	**81.33%**
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**11,550,000**	**11,550,000**	**100.00%**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,550,000	11,550,000	100.00%
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**37,666,000**	**36,117,000**	**95.89%**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	13,552,000	90.35%
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,050,000	8,033,000	99.79%
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,616,000	7,532,000	98.90%
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,000,000	7,000,000	100.00%
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-		0.00%
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**449,070,610**	**436,633,707**	**97.23%**
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100.00%
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,472,410	9,604,327	97.15%

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415,598,200	404,029,380	97.22%
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**208,940,000**	**90,899,000**	**43.50%**
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67,312,000	33,226,000	49.36%
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0.00%
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141,628,000	57,673,000	40.72%
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**634,321,000**	**602,411,580**	**94.97%**
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**634,321,000**	**602,411,580**	**94.97%**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32,927,000	31,547,000	95.81%
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	280,316,000	271,660,000	96.91%
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	317,324,000	295,450,580	93.11%
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	3,754,000	3,754,000	100.00%
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**754,321,000**	**741,559,000**	**98.31%**
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**754,321,000**	**741,559,000**	**98.31%**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	754,321,000	741,559,000	98.31%

Capaian realisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana
2) Efisiensi pelaksanaan kegiatan
3) Penyesuaian pelaksanaan kegiatan
4) Kendala administratif dan teknis

Realisasi anggaran program dan kegiatan secara umum telah mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Tingkat penyerapan anggaran sejalan dengan capaian indikator kinerja yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang belum optimal sehingga memerlukan perbaikan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penyerapan anggaran, perangkat daerah melakukan upaya sebagai berikut:

1) Penyempurnaan perencanaan anggaran berbasis kinerja
2) Peningkatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
3) Percepatan proses administrasi dan pengadaan
4) Peningkatan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala

Secara keseluruhan, capaian anggaran program dan kegiatan telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pencapaian sasaran kinerja. Dengan peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran, diharapkan realisasi anggaran pada periode berikutnya dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

III.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana sumber daya yang ada digunakan untuk mencapai hasil yang optimal. Efisiensi sumber daya berkaitan dengan bagaimana suatu entitas memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan output atau hasil tertentu, dengan meminimalkan pemborosan dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat efisiensi dikategorikan sebagai berikut :

- Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien

- Jika tingkat efisiensi sama dengan 1, maka impas

- Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jombang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	70	73.05	104.36%	26,460,345,004	24,979,046,865	94.40%	1.11 Efisien
	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	61.3	60.1	98.04%	17,171,457,004	5,850,851,445	92.31%	1.06 Efisien
	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan	100	100	100%	9,288,888,000	9,128,195,420	98.27%	1.02 Efisien

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	yang Berkelanjutan							

Berdasarkan hasil pengukuran, dari 3 indikator tingkat efisiensi pencapaian sasaran strategis mencapai lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa kinerja telah dicapai secara **EFISIEN**, karena realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian program dan kegiatan Kecamatan Jombang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
KECAMATAN				26,460,345,004	24,979,046,865	94.40%	
KECAMATAN JOMBANG				14,262,955,601	13,273,808,100	93.06%	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**100.67%**	**13,975,811,601**	**12,988,292,800**	92.93%	1.08 Efisien
Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	59.14	101.97%				
Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	4	133.33%				
Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	55	100.00%				
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	3.47	69.40%				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	83.05	99.34%				

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Kecamatan Jombang Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	80	100.00%				
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	**100.00%**	**23,508,000**	**23,508,000**	**100.00%**	1.00 Impas
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	15,336,000	15,336,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	4,242,000	4,242,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	-	-	0.00%	
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100.00%	3,930,000	3,930,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**11,520,467,317**	**10,818,856,199**	**93.91%**	**1.06** Efisien
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1736 Orang Bulan	1736 Orang Bulan	100.00%	11,452,967,317	10,751,356,199	93.87%	1.07 Efisien
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	65,940,000	65,940,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100.00%	1,560,000	1,560,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	**100.00%**	**60,000,000**	**60,000,000**	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	60,000,000	60,000,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.05 Administrasi	-	-	**0.00%**	**-**	**-**	**0.00%**	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Kepegawaian Perangkat Daerah							
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	0.00%	-	-	0.00%	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**100.00%**	**81,698,400**	**81,698,400**	**100.00%**	**1.00 Impas**
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	6,129,000	6,129,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	18,105,000	18,105,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100.00%	6,622,000	6,622,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	37,704,000	37,704,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100.00%	13,138,400	13,138,400	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0.00%	-	-	-	
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	0.00%	-	-	-	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**43,688,000**	**31,928,000**	**73.08%**	**1.37 Efisien**
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	-	-	0.00%	-	-	-	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	100.00%	43,688,000	31,928,000	73.08%	1.37 Efisien
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**2,134,497,284**	**1,893,899,067**	**88.73%**	**1.13 Efisien**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Pemerintahan Daerah							
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	3,500,000	3,500,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	102,601,818	72,627,017	70.79%	1.41 Efisien
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	2,028,395,466	1,817,772,050	89.62%	1.12 Efisien
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**111,952,600**	**78,403,134**	**70.03%**	**1.43 Efisien**
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100.00%	22,025,500	17,617,000	79.98%	1.25 Efisien
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit	16 Unit	100.00%	83,927,100	56,536,134	67.36%	1.48 Efisien
7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	-	-	0.00%	-	-	-	
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	9 Unit	100.00%	6,000,000	4,250,000	70.83%	1.41 Efisien
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0.00%	-	-	-	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**100.01%**	**9,901,000**	**9,842,300**	**99.41%**	1.01 Efisien

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	91.8	91.81	**100.01%**				
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**4,096,000**	**4,095,000**	**99.98%**	**1.00 Impas**
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	4,096,000	4,095,000	99.98%	1.00 Impas
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**5,805,000**	**5,747,300**	**99.01%**	**1.01 Efisien**
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100.00%	5,805,000	5,747,300	99.01%	1.01 Efisien
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**111.91%**	**188,951,000**	**188,381,000**	99.70%	1.12 Efisien
Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	86.67	123.81%				
Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**181,643,000**	**181,073,000**	**99.69%**	**1.00 Impas**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	25,058,000	25,058,000	100.00%	1.00 Impas

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	100.00%	156,585,000	156,015,000	99.64%	1.00 Impas
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	-		-	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**7,308,000**	**7,308,000**	**100.00%**	**1.00** **Impas**
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	7,308,000	7,308,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	0.00%	-	-	-	
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	0.00%	-	-	-	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**-**	**-**	**100.00%**	**-**	**-**	-	
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	0.00%	**-**	**-**	**-**	
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	0.00%	-	-	-	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	0.00%	-	-	-	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**142.86%**	**88,292,000**	**87,292,000**	98.87%	1.4 Efisien
Persentase Instansi Vertikal dan Stakeholder di Wilayah Kecamatan yang Berkolaborasi dengan Program Pemerintah Daerah (Persen)	70	100	142.86%				
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100.00%**	**88,292,000**	**87,292,000**	**98.87%**	**1.01 Efisien**
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25 Orang	25 Orang	100.00%	2,630,000	1,630,000	61.98%	1.61 Efisien
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	85,662,000	85,662,000	100.00%	1.00 Impas
KELURAHAN JOMBANG WETAN				**3,337,378,588**	**3,222,233,268**	**96.55%**	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**100.67%**	**676,537,588**	**631,376,428**	**93.32%**	1.08 Efisien
Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	59.14	101.97%				
Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	4	133.33%				
Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	55	100.00%				
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	3.47	69.40%				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	83.05	99.34%				
Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	80	100.00%				
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**11,550,000**	**11,550,000**	**100.00%**	**1.00 Impas**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	11,550,000	11,550,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**100.00%**	**28,707,000**	**28,690,000**	**99.94%**	**1.00 Impas**
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	6,989,000	6,986,000	99.96%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	10,230,000	10,217,000	99.87%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100.00%	4,988,000	4,988,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	5,650,000	5,649,000	99.98%	1.00 Impas

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	850,000	850,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100.00%**	**569,587,688**	**528,593,928**	**92.80%**	**1.08 Efisien**
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	32,544,028	24,014,004	73.79%	1.36 Efisien
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	537,043,660	504,579,924	93.96%	1.06 Efisien
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100.00%**	**66,692,900**	**62,542,500**	**93.78%**	**1.07 Efisien**
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit	100.00%	52,212,900	48,083,500	92.09%	1.09 Efisien
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit	100.00%	14,480,000	14,459,000	99.85%	1.00 Impas
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	-	0.00%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**111.91%**	**1,007,793,000**	**949,234,840**	**94.19%**	1.19 Efisien
Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	86.67	123.81%				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100.00%**	**1,007,793,000**	**949,234,840**	**94.19%**	**1.06 Efisien**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	40,178,000	37,433,000	93.17%	1.07 Efisien
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	18 Unit	18 Unit	100.00%	638,667,000	631,100,000	98.82%	1.01 Efisien
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	100.00%	328,084,000	280,146,840	85.39%	1.17 Efisien
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	864,000	555,000	64.24%	1.56 Efisien
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**100.00%**	**1,653,048,000**	**1,641,622,000**	**99.31%**	1.01 Efisien
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**1,653,048,000**	**1,641,622,000**	**99.31%**	**1.01 Efisien**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	1,653,048,000	1,641,622,000	99.31%	1.01 Efisien
KELURAHAN MASIGIT				**2,471,678,085**	**2,378,034,161**	**96.21%**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**100.67%**	**606,276,085**	**536,319,161**	**88.46%**	1.14 Efisien

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	59.14	101.97%				
Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	4	133.33%				
Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	55	100.00%				
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	3.47	69.40%				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	83.05	99.34%				
Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	80	100.00%				
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**5,800,000**	**5,800,000**	**100.00%**	**1.00 Impas**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	5,800,000	5,800,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**100.00%**	**39,065,000**	**37,051,000**	**94.84%**	**1.05 Efisien**
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	3,391,000	3,391,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	15,000,000	14,345,000	95.63%	1.05 Efisien
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100.00%	6,000,000	5,659,000	94.32%	1.06 Efisien
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	100.00%	7,674,000	6,942,000	90.46%	1.11 Efisien
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang	1 Paket	1 Paket	100.00%	7,000,000	6,714,000	95.91%	1.04 Efisien

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Cetakan dan Penggandaan							
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**-**	**-**	**0.00%**	**-**	**-**	**0.00%**	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**499,723,485**	**440,720,561**	**88.19%**	**1.13 Efisien**
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	1,500,000	1,500,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	40,603,465	22,148,559	54.55%	1.83 Efisien
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	457,620,020	417,072,002	91.14%	1.10 Efisien
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100.00%**	**61,687,600**	**52,747,600**	**85.51%**	**1.17 Efisien**
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	100.00%	36,807,600	27,867,600	75.71%	1.32 Efisien
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	21 Unit	100.00%	24,880,000	24,880,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**111.91%**	**731,283,000**	**712,885,000**	**97.48%**	1.15 Efisien

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	86.67	123.81%				
Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**731,283,000**	**712,885,000**	**97.48%**	**1.03 Efisien**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	40,102,000	36,120,000	90.07%	1.11 Efisien
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	19 Unit	19 Unit	100.00%	450,000,000	445,180,000	98.93%	1.01 Efisien
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/ Ormas	17 Pokmas/ Ormas	100.00%	241,181,000	231,585,000	96.02%	1.04 Efisien
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	-	-	0.00%	-		0.00%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**100.00%**	**1,134,119,000**	**1,128,830,000**	**99.53%**	1.00 Impas
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**1,134,119,000**	**1,128,830,000**	**99.53%**	**1.00 Impas**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	**1,134,119,000**	**1,128,830,000**	**99.53%**	1.00 Impas

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
KELURAHAN SUKMAJAYA				**2,047,784,703**	**2,016,838,766**	**98.49%**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**100.67%**	**537,493,703**	**514,255,766**	**95.68%**	1.05 Efisien
Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	59.14	101.97%				
Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	4	133.33%				
Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	55	100.00%				
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	3.47	69.40%				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	83.05	99.34%				
Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	80	100.00%				
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**14,550,000**	**14,550,000**	**100.00%**	**1.00 Impas**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	14,550,000	14,550,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100.00%**	**23,675,000**	**23,675,000**	**100.00%**	**1.00 Impas**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	100.00%	8,930,000	8,930,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100.00%	3,985,000	3,985,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	100.00%	9,775,000	9,775,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	985,000	985,000	100.00%	1.00 Impas

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Peraturan Perundang-undangan							
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	**100.00%**	**366,076,380**	**348,728,166**	**95.26%**	1.05 Efisien
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	31,000,000	29,023,900	93.63%	1.07 Efisien
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	335,076,380	319,704,266	95.41%	1.05 Efisien
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	**100.00%**	**133,192,323**	**127,302,600**	**95.58%**	1.05 Efisien
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100.00%	51,451,600	45,951,600	89.31%	1.12 Efisien
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100.00%	81,740,723	81,351,000	99.52%	1.00 Impas
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**111.91%**	**691,896,000**	**684,188,000**	**98.89%**	1.13 Efisien
Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	86.67	123.81%				
Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	100	100.00%				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	**100.00%**	**691,896,000**	**684,188,000**	**98.89%**	1.01 Efisien
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	38,652,000	37,452,000	96.90%	1.03 Efisien
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	21 Unit	21 Unit	100.00%	322,040,000	17,815,000	98.69%	1.01 Efisien
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	100.00%	331,204,000	28,921,000	99.31%	1.01 Efisien
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	-		0.00%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**100.00%**	**818,395,000**	**18,395,000**	**100.00%**	1.00 Impas
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**818,395,000**	**818,395,000**	**100.00%**	**1.00 Impas**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	100.00%	818,395,000	18,395,000	100.00%	1.00 Impas
KELURAHAN PANGGUNG RAWI				**2,244,679,417**	**2,168,962,283**	**96.63%**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**100.67%**	**658,210,417**	**595,565,283**	**90.48%**	1.11 Efisien
Persentase BMD dalam Kondisi Baik	58	59.14	101.97%				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
dan Termanfaatkan (Persen)							
Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	4	133.33%				
Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	55	100.00%				
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	3.47	69.40%				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	83.05	99.34%				
Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	80	100.00%				
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**11,140,000**	**11,140,000**	**100.00%**	**1.00 Impas**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	11,140,000	11,140,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**18,800,000**	**13,883,000**	**73.85%**	**1.35 Efisien**
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket	100.00%	3,016,000	3,016,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	100.00%	10,000,000	6,954,000	69.54%	1.44 Efisien
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100.00%	5,784,000	3,913,000	67.65%	1.48 Efisien
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**9,637,500**	**9,637,000**	**99.99%**	**1.00 Impas**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	100.00%	9,637,500	9,637,000	99.99%	1.00 Impas
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**478,787,574**	**439,591,283**	**91.81%**	**1.09 Efisien**
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	2,000,000	1,740,000	87.00%	1.15 Efisien
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	55,834,894	50,603,623	90.63%	1.10 Efisien
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	420,952,680	387,247,660	91.99%	1.09 Efisien
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**139,845,343**	**121,314,000**	**86.75%**	**1.15 Efisien**
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	100.00%	46,455,343	32,779,000	70.56%	1.42 Efisien
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	100.00%	17,240,000	14,559,000	84.45%	1.18 Efisien
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100.00%	76,150,000	73,976,000	97.15%	1.03 Efisien
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**111.91%**	**650,845,000**	**640,023,000**	**98.34%**	1.14 Efisien
Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (Persen)	70	86.67	123.81%				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100.00%**	**650,845,000**	**640,023,000**	**98.34%**	**1.02 Efisien**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	26,980,000	26,980,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	8 Unit	100.00%	365,364,000	62,440,000	99.20%	1.01 Efisien
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100.00%	252,823,000	45,408,000	97.07%	1.03 Efisien
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	4 laporan	4 laporan	100.00%	5,678,000	5,195,000	91.49%	1.09 Efisien
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**100.00%**	**935,624,000**	**933,374,000**	**99.76%**	1.00 Impas
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**935,624,000**	**933,374,000**	**99.76%**	**1.00 Impas**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%	935,624,000	33,374,000	99.76%	1.00 Impas
KELURAHAN GEDONG DALEM				**2,095,868,610**	**1,919,170,287**	**91.57%**	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Kecamatan Jombang Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**100.67%**	**707,226,610**	**575,199,707**	**81.33%**	1.24 Efisien
Persentase BMD dalam Kondisi Baik dan Termanfaatkan (Persen)	58	59.14	101.97%				
Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	3	4	133.33%				
Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	55	55	100.00%				
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	5	3.47	69.40%				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83.6	83.05	99.34%				
Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	80	80	100.00%				
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**11,550,000**	**11,550,000**	**100.00%**	**1.00 Impas**
7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	11,550,000	11,550,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100.00%**	**37,666,000**	**36,117,000**	**95.89%**	**1.04 Efisien**
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Paket	13 Paket	100.00%	15,000,000	13,552,000	90.35%	1.11 Efisien
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100.00%	8,050,000	8,033,000	99.79%	1.00 Impas
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 paket	10 paket	100.00%	7,616,000	7,532,000	98.90%	1.01 Efisien
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	100.00%	7,000,000	7,000,000	100.00%	1.00 Impas

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0.00%	-		0.00%	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**100.00%**	**449,070,610**	**436,633,707**	**97.23%**	**1.03 Efisien**
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	3,000,000	3,000,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	30,472,410	29,604,327	97.15%	1.03 Efisien
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	415,598,200	404,029,380	97.22%	1.03 Efisien
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100.00%**	**208,940,000**	**90,899,000**	**43.50%**	**2.30 Efisien**
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	12 Unit	100.00%	67,312,000	33,226,000	49.36%	2.03 Efisien
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100.00%	141,628,000	57,673,000	40.72%	2.46 Efisien
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**111.91%**	**634,321,000**	**02,411,580**	**94.97%**	1.18 Efisien
Persentase Lingkungan (RW) yang ditingkatkan Sarana dan	70	86.67	123.81%				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
Prasarananya (Persen)							
Persentase Ketersediaan Data Sektoral Kelurahan Hasil Koordinasi RW dan RT (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100.00%**	**634,321,000**	**602,411,580**	**94.97%**	**1.05 Efisien**
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	100.00%	32,927,000	31,547,000	95.81%	1.04 Efisien
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Unit	7 Unit	100.00%	280,316,000	71,660,000	96.91%	1.03 Efisien
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	100.00%	317,324,000	95,450,580	93.11%	1.07 Efisien
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	3,754,000	3,754,000	100.00%	1.00 Impas
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			**100.00%**	**754,321,000**	**741,559,000**	**98.31%**	1.02 Efisien
Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani (Persen)	100	100	100.00%				
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.00%**	**754,321,000**	**741,559,000**	**98.31%**	**1.02 Efisien**
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	100.00%	754,321,000	741,559,000	98.31%	1.02 Efisien

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran pada tujuan dan sasaran, diperoleh tingkat efisiensi sebesar ±100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berada pada kondisi **impas (break even)**, di mana capaian kinerja yang dihasilkan sebanding dengan anggaran yang digunakan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan secara **efisien**, karena tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan signifikan antara anggaran yang direalisasikan dengan hasil kinerja yang dicapai. Dengan demikian, instansi telah mampu mengelola anggaran secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan strategis, yaitu peralihan dari pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021-2026 menuju RENSTRA Tahun 2025-2029. Pada tahun transisi ini, pelaksanaan program dan kegiatan tetap mengacu pada **Perjanjian Kinerja Tahun 2025** yang disusun berdasarkan RENSTRA periode sebelumnya, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan terbaru.

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Jombang Kota Cilegon menunjukkan hasil yang **SANGAT BAIK**, dimana sebagian besar indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan meskipun berada dalam masa transisi, pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Hasil kinerja pada tahun transisi ini menjadi bahan pembelajaran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan RENSTRA Tahun 2025-2029, khususnya dalam penyempurnaan indikator kinerja, penajaman sasaran strategis, serta peningkatan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja indikator sasaran selama periode tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Kecamatan Jombang berhasil mencapai sebagian besar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun ini. Pencapaian positif terutama terlihat pada sektor pelayanan publik dan pengelolaan anggaran, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efentifitas kinerja di masa mendatang.

Pencapaian Kinerja

Secara umum, Kecamatan Jombang telah berhasil mencapai **100,80%** dari total target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Keberhasilan terbesar tercatat pada indikator Skor Penilaian Kecamatan dengan capaian 104,36 % dari target yang ditetapkan tercapai.

Untuk capaian anggaran di tahun 2025 sebesar **94.40%** dengan realisasi sebesar **Rp 24.979.046.865,00** dari anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp 26.460.345.004,00**

Faktor Pendukung dann Penghambat

Beberapa faktor pendukung yang berkontribusi pada pencapaian kinerja antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/kompetensi berkelanjutan dan penerapan teknologi informasi yang meudahkan proses administrasi. Selain itu, dukungan penuh dari pimpinan dalam hal alokasi anggaran dan sumber daya juga menjadi faktor yang mendukung pencapaian sasaran.

Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, antara lain keterbatasan SDM di beberapa unit kerja yang memperngaruhi kecepatan pelayanan serta adanya kesulitan dalan pengelolaan anggaran yang lebih kompleks akibat kurang maksnya sistem pelaopan yang terintegrasi.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa mendatang, Kecamatan Jombang perlu :

1) Memperkuat sistem pelaporan anggaran berbasis teknologi untuk memastikan akurasi dan efisiensi penggunaan anggaran;
2) Meningkatkan jumlah SDM di unit-unit yang memiliki beban tugas tinggi terutama dalam layanan administratif dan pengelolaan keuangan;

3) Menyusun kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi perubahan harga dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran;
4) Melanjutkan program pelatihan SDM untuk meningkatkan keterampilan dalam hal pengelolaan anggaran dan penggunaan teknologi informasi.

Cilegon, 26 Januari 2026
CAMAT JOMBANG KOTA CILEGON

BURHANUDIN, SE
Pembina
NIP. 19800121 200312 1 005

PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN JOMBANG
Jl. Kranggot No. 150 Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon 42411 Telp. (0254) 378 373
E-mail : kecjombang@email.cilegon.go.id website : kecjombang.cilegon.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG KOTA CILEGON
NOMOR : 700/Kep. 005 –Kec.Jombang/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN JOMBANG TAHUN 2025

CAMAT JOMBANG KOTA CILEGON,

Menimbang :

a. bahwa telah dilaksanakannya seluruh rangkaian kegiatan pada Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dalam rangka mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dipandang perlu disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

c. untuk menyusun laporan kinerja sebagaimana huruf b di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) melalui Keputusan Camat Jombang Kota Cilegon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;)
5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025.**

KESATU : Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Mengumpulkan dan menginventarisir data yang diperlukan;
- Menganalisis, mengolah dan menyusun data-data yang ada secara sistematis;
- Melaporkan hasil kerja kepada Walikota Cilegon melalui Inspektorat Kota Cilegon;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas, dibebankan pada APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2024 pada pos anggaran Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila diperlukan.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada tanggal : 02 Januari 2026

CAMAT JOMBANG KOTA CILEGON

BURHANUDIN, SE
Pembina
NIP. 19800121 200312 1 005

Lampiran : Keputusan Camat Jombang Kota Cilegon

Nomor : 700/Kep.005–Kec.Jombang/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

SUSUNAN TIM PANITIA PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025

Penasihat : Camat Jombang Kota Cilegon

Penanggung Jawab : Sekretaris Kecamatan Jombang

Ketua Tim : Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Jombang

Anggota :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jombang
2. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Jombang
3. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Jombang
4. Kepala Seksi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jombang
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jombang
6. Lurah se-Kecamatan Jombang
7. Perencana Ahli Pertama Kecamatan Jombang
8. Bendahara Kecamatan Jombang

CAMAT JOMBANG KOTA CILEGON,

BURHANUDIN, SE
Pembina
NIP. 19800121 200312 1 005

Tembusan :
1. Yth. Walikota Cilegon, sebagai laporan;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Cilegon;
3. Yth. Inspektur Kota Cilegon;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon

WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Kota Cilegon 2025-2029, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cilegon, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 807);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinetja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 127);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2025-2029, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran I sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Wali Kota.

KETIGA ...

KETIGA : Indikator Kinerja Utama pada Lampiran II sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan digunakan sebagai Pedoman untuk Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 10 September 2025
WALI KOTA CILEGON,

ROBINSAR

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Daerah Kota Cilegon
3. Yth. Kepala BPKPAD Kota Cilegon
4. Kepala Perangkat Daerah terkait

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN 2025-2029.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
T.1 - Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan inklusif		Indeks Pendidikan	Poin	Indeks Pendidikan = (IHLS + IRLS)/2 IHLS (Indeks Harapan Lama Sekolah) = (HLS - 0)/ (18-0) * batas maksimum HLS ditetapkan 18 tahun, setara pendidikan S1 IRLS (Indeks Rata-rata Lama Sekolah) = (RLS - 0)/ (15-0) * batas maksimum RLS ditetapkan 15 tahun, setara SMA

	S.1.1 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yang merata	Angka Partisipasi PAUD	Persen	Angka Partisipasi PAUD (%) = (Jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang ikut PAUD/Jumlah anak usia 5-6 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Persen	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%) = (Jumlah anak usia 7–15 tahun yang sedang bersekolah / Jumlah anak usia 7-15 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Kesetaraan	Persen	Angka partisipasi pendidikan keseteraan (%) = (jumlah peserta program keseteraan /jumlah populasi yang memenuhi syarat) x 100%
	S.1.2 - Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	Poin	IPP=0,20 × (Pendidikan + Kesehatan + Ketenagakerjaan + Partisipasi + Gender)
	S.1.3 - Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Poin	IPLM = (Skor_Ketersediaan x 0,25) + (Skor_Aksesibilitas x 0,25) + (Skor Kualitas x 0,25) + (Skor_Budaya_Baca x 0,25)
T.2 - Pertumbuhan ekonomi yang inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	Diukur berdasarkan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto secara riil atau PDRB ADHK (menghilangkan faktor inflasi).

				Pertumbuhan Ekonomi (%) = (PDRB ADHK Tahun n – PDRB ADHK Tahun n-1 / PRDB ADHK Tahun n-1) × 100
	S.2.1 - Terwujudnya ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	Pertumbuhan Investasi (%) = (Realisasi Investasi Tahun n − Realisasi Tahun n-1) × 100
	S.2.2 - Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	TPT (%) = (Jumlah Penganggur Terbuka / Jumlah Angkatan Kerja) x 100%
T.3 - Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Perhitungan UHH menggunakan tabel hidup (life table) yang diukur oleh BPS setiap tahunnya.
	S.3.1 - Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau	Indeks Pelayanan Publik di bidang pelayanan kesehatan (poin)	Poin	Setiap indikator dinilai dalam bentuk skor kuantitatif oleh responden (masyarakat pengguna layanan). IPP = (∑ni / n) x 100
	S.3.2 - Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	Rumus Perhitungan Persentase PHBS: Persentase PHBS (%) = (Jumlah rumah tangga yang menerapkan seluruh indikator PHBS / Jumlah seluruh rumah tangga yang di survei) x 100
T.4 - Terwujudnya		Indeks Reformasi	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan

birokrasi bersih, akuntabel dan berintegritas tinggi		Birokrasi		melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	S.4.1 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rasio Kemandirian Fiskal	Poin	Rasio Kemandirian Fiskal (%) = (Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total Pendapatan) x 100
	S.4.2 - Terwujudnya transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional	Indeks Pemerintahan Digital	Poin	Perhitungan Skor DGI = ∑(Nilai Subkomponen x Bobotnya) Total skor berada dalam rentang 0–100.
	S.4.3 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sakip	Nilai	Berdasarkan penilaian kemenpan-RB atas implementasi Sakip Pemerintah Daerah
	S.4.4 - Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan dan kolaborasi pemerintah daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	Metode Penghitungan IKK 1. Dilakukan dengan self-assessment oleh instansi pemerintah. 2. Objek penilaian: kebijakan pembangunan strategis yang sudah diimplementasikan minimal 3 tahun terakhir. 3. Instrumen penilaian menggunakan kuisioner digital berbasis web (Sistem

				Informasi IKK – LAN). Skor dihitung dengan metode weighted scoring, lalu dikategorikan dalam predikat kualitas. Kategori Nilai IKK : 91,00 – 100 : Unggul 80,00 – 90,99 : Sangat Baik 65,00 – 79,99 : Baik 50,00 – 64,99 : Cukup < 50,00 : Kurang
T.5 - Terwujudnya kota layak huni dan berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni (livable city index)	Poin	Cara penghitungan : 1. Nilai per Indikator Setiap indikator diberi skor antara 0–100 berdasarkan capaian aktual dibandingkan standar. Standar ditetapkan dalam lampiran Permen berdasarkan tipe kota. 2. Hitung Nilai per Dimensi Skor Dimensi= (∑Skor indikator pada dimensi)/(Jumlah Indikator) 3. Hitung Indeks Kota Layak Huni IKLH = ∑_(i=1)^6▒〖(Skor Dimensi "i × Bobot i" 〗)
	S.5.1 - Terwujudnya infrastruktur layanan	Indeks Infrastruktur	Angka	Indeks Infrastruktur adalah indikator komposit yang digunakan untuk

	perkotaan yang inklusif, modern dan terintegrasi			mengukur kualitas dan kinerja infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur, seperti: - Jaringan dan Jalan: Kondisi dan aksesibilitas jalan. - Angkutan Umum: Ketersediaan dan kualitas layanan transportasi publik. - Air Bersih: Akses terhadap air bersih yang layak konsumsi. - Sanitasi: Ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai. - Listrik: Akses terhadap pasokan listrik yang stabil. - Telekomunikasi: Ketersediaan dan kualitas layanan komunikasi dan internet. Pengukuran Indeks Infrastruktur dilakukan dengan menghitung rata-rata geometrik dari nilai indeks masing-masing komponen infrastruktur. Nilai indeks berkisar antara 0 hingga 100, di mana nilai mendekati 100 menunjukkan kondisi infrastruktur yang baik, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kondisi yang buruk.

	S.5.2 - Meningkatnya keselarasan ruang dan berkembangnya kawasan strategis daerah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	PKPR (%) = (Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR)/(Total luas pemanfaatan ruang eksisting) x 100% RTR = Rencana tata ruang yang belaku (RTRW/RDTR)
	S.5.3 - Berkurangnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	Indeks Resiko Bencana (IRB) = Ancaman x Kerentanan / Kapasitas Kategori Nilai IRB (BNPB) - 0,00 – 0,25 : Risiko Rendah - 0,26 – 0,50 : Risiko Sedang - 0,51 – 1,00 : Risiko Tinggi
	S.5.4 - Meningkatnya kualitas daya dukung lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	IKLH = (35% x IKA) + (35% x IKU) + (30% x ITL) keterangan : IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara ITL : Indeks Tutupan Lahan Nilai IKLH disajikan dalam skala 0–100, dengan interpretasi: - ≥ 80 : Baik (Lingkungan sangat mendukung kehidupan) - 60 – 79 : Sedang (lingkungan cukup mendukung) - < 60 : Buruk (Lingkungan tidak

				mendukung secara optimal)
	S.5.5 - Meningkatnya keamanan dan kondusivitas daerah	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	Proporsi Rasa Aman= (Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang merasa aman berjalan sendirian / jumlah total penduduk usia > 15 tahun) x 100%
	S.5.6 - Terwujudnya pemerataan pembangunan potensi kewilayahan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	Presentase Kelurahan Cepat Berkembang (%) = (Jumlah kelurahan atau desa kategori "Cepat Berkembang") / (Total kelurahan atau desa) x 100%
T.6 - Pemerataan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	Persen	Tingkat kemiskinan = Jumlah penduduk miskin / Jumlah penduduk x 100% Ket : Penduduk miskin : penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan Jumlah penduduk : seluruh penduduk di Kota Cilegon pada periode tertentu Garis Kemiskinan (GK) : nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2100 kkal/kapita/hari) dan kebutuhan dasar non-makanan

	S.6.1 - Meningkatnya perlindungan sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Indikator ini diukur dari 3 dimensi yaitu : 1) dimensi kebutuhan dasar (bobot 27%) yang meliputi pangan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan 2) dimensi peranan sosial (bobot 31%) yang meliputi partisipasi, kohesi sosial dan kelembagaan inklusi 3) dimensi keberdayaan ekonomi (bobot 41%) yang meliputi partisipasi dalam aktifitas ekonomi, utilitas/daya guna, ketahanan ekonomi.
	S.6.2 - Meningkatnya Daya Beli dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Daya Beli Masyarakat	Ribu Rupiah	Diukur oleh BPS sebagai indikator pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM)
	S.6.3 - Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang diukur berdasarkan data dari Formulir Pendataan Keluarga (PK). Penghitungan iBangga dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk variabel yang terpenuhi dan 0 untuk yang tidak, kemudian dihitung rata-rata skor per dimensi dan dikonversi menjadi nilai indeks antara 0 hingga 100. Kategori Nilai iBangga : - Kurang Baik (Rentan): Nilai iBangga < 40 - Cukup Baik (Berkembang): Nilai

				iBangga 40–70 - Baik (Tangguh): Nilai iBangga > 70

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR : 800.05/Kep.203-Org/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN 2025-2029

1. SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengevaluasi dua komponen utama: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results), yang masing-masing memiliki bobot dalam total nilai IRB. Komponen Pengungkit meliputi area seperti manajemen perubahan dan SDM aparatur, sementara Komponen Hasil mencakup akuntabilitas kinerja, kualitas layanan publik, pemerintahan bersih, dan kinerja organisasi. Penilaian dilakukan melalui survei eksternal dan penilaian mandiri yang kemudian diolah menggunakan formula tertentu oleh evaluator Kementerian PANRB untuk menghasilkan nilai akhir IRB

	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN RI meliputi aspek-aspek penting dalam siklus kebijakan, seperti: 1. Perencanaan Kebijakan: Relevansi kebijakan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan masyarakat. 2. Implementasi Kebijakan: Efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. 3. Evaluasi Kebijakan: Seberapa baik kebijakan dievaluasi, termasuk dampak positif dan negatifnya. 4. Transparansi dan Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam proses kebijakan. Dengan Interval Nilai 0 - 100 dengan urutan predikat Unggul-Sangat Baik- Baik- Cukup - Kurang

2. INSPEKTORAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Maturitas SPIP = (Total Skor Hasil Evaluasi / Skor Maksimal) x 100%
	Meningkatnya Prosentase Penyelesaian Tindaklanjut Rekomendasi Temuan BPK Perwakilan Provinsi Banten	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi) x 100%
	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Maturitas SPIP = (Total Skor Hasil Evaluasi / Skor Maksimal) x 100%
	Meningkatnya	Kapabilitas Aparat	Level	Hasil Evaluasi Capaian Kapabilitas APIP yang

	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		dilakukan oleh BPKP berdasarkan 6 elemen penilaian meliputi: 1. Pengelolaan SDM; 2. Praktek Profesional; 3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 4. Budaya dan Hubungan Organisasi; 5. Struktur Tata Kelola; 6. Peran dan Layanan APIP
	Terwujudnya kinerja Inspektorat yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

3. SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Tingat kepuasan = Skor jawaban seluruh responden / (Jml Pertanyaan x Jml Respoden) x 100
	Terwujudnya kualitas perumusan kebijakan DPRD dan kolaborasi pemerintah daerah.	Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	Perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan oleh LAN RI, meliputi aspek-aspek penting dalam siklus kebijakan, seperti: 1. Perencanaan Kebijakan: Relevansi kebijakan dengan permasalahan yang ada dan kebutuhan masyarakat. 2. Implementasi Kebijakan: Efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. 2. Evaluasi Kebijakan: Seberapa baik kebijakan dievaluasi, termasuk dampak positif dan negatifnya. 3. Transparansi dan Partisipasi: Tingkat keterlibatan masyarakat dan keterbukaan dalam proses kebijakan.

				Dengan Interval Nilai 0 - 100 dengan urutan predikat Unggul-Sangat Baik- Baik- Cukup - Kurang
	Terwujudnya kinerja sekretariat DPRD yang akuntabel dan profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RISET DAN INOVASI DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	Indek Perencanaan Pembangunan = Nilai Sinergi (32) + Kualitas Perencanaan (58) + Keterhubungan (10)
		Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	PKBB = (Jumlah kebijakan, program, atau regulasi yang disusun)/(analisis kebijakan, atau hasil evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis) x 100
	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi yang berkualitas	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Indeks Inovasi Daerah = (Skor Total)/(Skor Maksimum) x 100
	Terwujudnya kinerja Bappedarida yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti

				peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Sinergi, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Perencanaan Kinerja	Nilai komponen sinergi pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	Penjumlahan nilai bobot Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN (9) +Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP (13) + Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk membiayayi Program Prioritas Nasional/Major Project dalam Dokumen RKPD (10)
		Nilai komponen kualitas perencanaan pada indeks perencanaan pembangunan daerah	Poin	Penjumlahan nilai bobot Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/Proyek (49) + Inovasi Perencanaan pembangunan (9)
		Nilai komponen keterhubungan pada indeks perencanaan pembangunan daerah	Poin	Apabila Target dan sasaran pembangunan daerah yang cascade dengan target dan sasarah kinerja lembaga terkait makan nilai (10)

5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun N-1
	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	P tepat waktu = (L tepat waktu / L total) x 100% P. Tepat waktu = Persentase laporan yang diserahkan tepat waktu (%) L. Tepat Waktu = Jumlah laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu L. Total - Jumlah total laporan keuangan yang diharapkan diserahkan
	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	Penambahan Nilai Aset Tetap tahun N dibandingkan dengan Tahun N-1 apabila data belum tersedia, maka menggunakan data tahun sebelumnya P Penambahan aset tetap = (A akhir - A awal) / A awal x 100%

	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Realisasi PAD tahun N-1 terhadap realisasi Pendapatan Daerah tahun N-1 Persentase PAD = (PAD / Pendapatan daerah) x 100% P.PAD = Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) PAD = Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah = Total Pendapatan Daerah
	Terwujudnya Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional,dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan		Indeks Merit System	Poin	Indeks Merit System : Akumulasi atau jumlah dari skor/nilai dari tim penilai mandiri yang telah diverifikasi oleh KASN, dari aspek-aspek di bawah ini, sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019: - Perencanaan Kebutuhan & Standardisasi Jabatan (10%) - Manajemen Talenta (20%) - Pengelolaan Kinerja (14%) - Pengembangan Kompetensi (16%) - Penguatan Budaya Kerja & Citra Institusi (10%) - Penghargaan & Pengakuan (10%) - Disiplin, Pemberhentian, & Upaya Administratif (10%) - Digitalisasi Manajemen ASN (10%)
	Terwujudnya tata kelola ASN yang berkualitas melalui	Indeks implementasi NSPK Manajemen ASN	Poin	Formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem

	peningkatan kompetensi, penilaian kinerja yang akuntabel, dan penegakan kode etik serta disiplin kerja.			aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Dengan kategori Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat Unggul; Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat Baik; Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat Cukup; Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat Kurang; dan Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat Buruk.
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. Penilaian IP ASN mencakup sejumlah aspek yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kedisiplinan ASN, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rumusnya adalah : IP ASN=(0,30×Kualifikasi)+(0,30×Kompetensi)+

				(0,40×Kinerja)−(Disiplin)
	Terwujudnya kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akuntabel dan profesional.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten berdasarkan hasil rilis tahun terakhir
	Meningkatnya Kinerja Badan Kesbangpol yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	Nilai Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) yang diperoleh dari Ditjen Polpum Kemendagri yang terdiri dari dimensi aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Keberagaman berdasarkan hasil rilis tahun terakhir

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Berkurangnya Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	Risiko Bencana = Ancaman x (Kerentanan/Kapasitas)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Berdasarkan Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari Tim Evaluator

9. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Inklusif dan Terintegrasi		Indeks Infrastruktur	Angka	Jumlah capaian infrastruktur jalan, air minum, drainase, air limbah domestik, gedung negara, dan bangunan pengendali banjir dibagi jumlah sektor infrastruktur.
	Meningkatnya kinerja dinas PUPR yang profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas.	Rasio kemantapan jalan	Persen	Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) berbanding total panjang jalan kota.
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	Persen	Jumlah rumah tangga atau jumlah KK yang memiliki akses aman dan layak dibagi dengan jumlah total rumah tangga atau KK di Kota Cilegon

		(Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir.	Persen	Luas kawasan permukiman yang terlindungi dari banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelyanan air minum curah lintas kabupaten /kota (%)	Persen	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (jiwa) dibagi dengan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM (jiwa)) dikalikan seratus persen
		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi dengan panjang total drainase dikali seratus persen
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persen	Luas pemanfaatan ruang di Lahan Terbangun yang sesuai dengan RTRW dibagi Total Luas pemanfaatan ruang yang Terbangun pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

		Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	Jumlah kegiatan konstruksi yang diawasi dibandingkan dengan total kegiatan konstruksi yang direncanakan
		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik.	Persen	Jumlah bangunan gedung negara yang dalam kondisi baik dibagi dengan jumlah total bangunan gedung negara milik pemerintah kota cilegon
		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	Luas kawasan perkotaan yang ditata dibagi dengan luas wilayah berdasararkan RTBL Kota CIlegon dikalikan seratus persen

10. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas dan merata		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	**Rata-rata Lama Sekolah 15+** $\bar{X}_{15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ **Keterangan:** • P_{15+}= Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas • x_i= Lama sekolah penduduk ke-i
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	HLS = Σ (Jumlah penduduk usia i yang bersekolah / Jumlah penduduk usia i) x 1 tahun; i mewakili kelompok usia mulai dari usia minimum hingga usia maksimum yang dihitung
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	

				IPK = $$IPK = \sum_{j=1}^{7} (W_j \times \text{Indeks } D_j)$$ **Keterangan:** • IPK= Indeks Pembangunan Kebudayaan • W_j= Bobot dimensi ke-j • D_j= Dimensi ke-j **Rumus menghitung indeks dimensi (D_j):** $$\text{Indeks } D_j = (\frac{\sum_{i=1}^{n_j} SK_{ij}}{n_j}) \times 100$$ **Keterangan:** • D_j= Dimensi ke-j • SK_{ij}= Nilai indikator $i$pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi • n_j= Jumlah indikator pada dimensi ke-j

	Perangkat daerah yang Akuntabel dan Profesional	Birokrasi Perangkat Daerah		melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Tata Kelola Pendidikan yang Berkualitas	Angka Partisipasi PAUD	Persen	Angka Partisipasi PAUD (%) = (Jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang ikut PAUD / Jumlah anak usia 5 - 6 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Pendidikan Dasar	Persen	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%) = (Jumlah anak usia 7 - 15 tahun yang sedang bersekolah / Jumlah anak usia 7 - 15 tahun) x 100%
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Persen	Angka partisipasi pendidikan keseteraan (%) = (jumlah peserta program keseteraan /jumlah populasi yang memenuhi syarat) x 100%
	Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan yang Dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Persen	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dibagi Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditargetkan di tahun n dikali 100%

f

11. DINAS KESEHATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	**Usia Harapan Hidup (UHH)** Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*
	Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau	Indeks Pelayanan Publik di bidang pelayanan kesehatan	Poin	IPP = 0,24*skor aspek kebijakan pelayanan + 0,25*skor aspek profesionalisme + 0,18*skor aspek sarana prasarana + 0,11*skor aspek sistem informasi pelayanan publik + 0,1*skor nilai konsultasi dan pengaduan + 0,12*skor nilai inovasi pelayanan; Skor aspek adalah jumlah skor indikator pada masing-masing aspek, dengan bobot nilai indikator sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kategori indeks pelayanan publik : 0,00 - 1,00 , kategor F, makna gagal 1,01 - 1,50, kategori E, makna sangat buruk 1,51 - 2,00, kategori D, makna buruk 1,51 - 2,00, kategori C-, makna cukup (dengan catatan) 2,51 - 3,00, kategori C, makna cukup

				3,01 - 3,50. kategoir B-, makna baik (dengan catatan) 3,51 - 4,00, kategori B, makna baik 4,01 - 4,50, kategori A-, makna sangat baik 4,51- 5,00, kategori A, makna pelayanan prima
	Meningkatnya kualitas penerapan gaya hidup sehat masyarakat	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persen	(Jumlah masyarakat usia > 7 tahun yang menerapkan perilaku hidup sehat sesuai DO / jumlah total peserta survei) x 100%
	Terwujudnya kinerja Dinas Kesehatan yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

12. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya peningkatan unsur pembangunan literasi masyarakat dan tata kelola arsip yang sesuai kaidah kearsipan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) 1-7 = total jumlah variabel komponen pembentuk indeks unsur pembangun literasi masyarakat dari masing-masing jenis perpustakaan (kab/kota, kec/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan khusus) dibagi dengan komponen aspek masyarakat lalu dibagi lagi dengan standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung dan untuk penghitungan IPLM Kabupaten/Kota diperoleh dari hasil jumlah total UPLM 1-7 dibagi 7 dikali 100 Catatan: Penghitungan IPLM terdiri dari 7 Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1); Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2); ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3); Tingkat kunjungan masyarakat (UPLM 4); Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5); Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (UPLM 6); dan Jumlah Anggota

				Perpustakaan (UPLM 7)
		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan = Nilai pengawasan kearsipan eksternal ditambah Nilai pengawasan kearsipan internal Keterangan : Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal (yang dikali bobot 60 %) ditambah nilai hasil pengawasan kearsipan internal (yang dikali bobot 40 %)
	Terwujudnya kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya literasi masyarakat secara komprehensif dan pelestarian naskah kuno yang berkelanjutan	Tingkat pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persen	Pertumbuhan pertumbuhan kunjungan (%) = ((Nilai Tahun N - Nilai Tahun N-1) / Nilai Tahun N-1) * 100 Keterangan : Jumlah kunjungan onsite dan/atau online masyarakat Kota Cilegon ke perpustakaan di tahun berkenaan dikurangi di tahun

				sebelumnya lalu dibagi tahun sebelumnya dikali 100. (Jenis Perpustakaan : Umum, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Khusus)
	Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung ketersediaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	Formulasi : Tingkat ketersediaan arsip = Hasil perhitungan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional ditambah Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip dibagi 2

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Memakai Perhitungan IKLH Kota IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Ket : - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
		Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	((Emisi GRK Tahun Dasar - Emisi GRK Tahun Pelaporan) / Aktivitas Tahun Dasar) x 100%.
	Terwujudnya Kinerja DLH yang Akuntable dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Lahan serta menurunya Emisi GRK.	Indeks Kualitas Air	Indeks	IKA Kab/Kota = $\frac{\sum_i^n \ IKA\ Titik\ Pantau}{Jumlah\ Titik\ Pantau}$ IKA = Indeks Kualitas Air n = Jumlah parameter kualitas air i = indeks
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	$IKU = 100 - [\frac{50}{0,9} x\ (Ieu - 0,1)]$ IKU = indeks kualitas udara Ieu = indeks udara EU
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Nilai yang menggambarkan kualitas lahan, yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut
		Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persen	%PEt = PEt / Ebt %PEt = persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t PEt = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t EBt = emisi GRK total sektoral baseline tahun t

				t = tahun perhitungan
		Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persen	%PEK = ∑t i = base year PEt / ∑t i = base year EBt %PEK = persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif ∑t i = base year PEt = akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun t ∑t i = base year EBt = akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t t = titik tahun perhitungan i = base year tahun 2010

14. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Dan Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_P = \sqrt[2]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK\,20}\right)^2 \times (PR_P \times SE_P)^2 \times TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[2]{1 \times (PR_L \times SE_L)^2 \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic $HARM\,(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK\,20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM\,(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender

		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100%
	Terwujudnya kinerja DP3AP2KB yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+,p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)

<table>
<tr>
<td rowspan="2"></td>
<td></td>
<td>Indeks Perlindungan Anak (IPA)</td>
<td>Indeks</td>
<td>
Metode Perhitungan
Bobot masing-masing klaster:
<table>
<tr><th>Klaster</th><th>Bobot</th></tr>
<tr><td>1. Hak Sipil dan Kebebasan</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</td><td>22%</td></tr>
<tr><td>3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>5. Perlindungan Khusus</td><td>22%</td></tr>
</table>
Persamaan yang digunakan untuk memperoleh indeks klaster IPA adalah sebagai berikut:
$$Indeks\ K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n_j} SK_{ij}}{n_j}\right) x\ 100$$
dimana
$Indeks\ K_j$: nilai indeks klaster ke-j
SK_{ij} : nilai indikator ke-i pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi
n_j : banyaknya indikator pada klaster ke-j
Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. Persamaan yang digunakan untuk penghitungan IPA adalah sebagai berikut:
$$\sum_{j=1}^{5} Wj\ x\ Indeks\ Kj$$
</td>
</tr>
<tr>
<td>Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas</td>
<td>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)</td>
<td>Indeks</td>
<td>$IPBK = (D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4 \times D_5)^{\wedge}(\frac{1}{5})$</td>
</tr>
</table>

15. DINAS SOSIAL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu Revieu (Belum ada perhitungan
	Terwujudnya kinerja Dinas Sosial yang akuntabel dan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan

	profesional			berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	X = Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi Y = Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial Indikator Kinerja = X/Y x 100%
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti Sosial	Persen	Rumus: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti. Y = Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah Kabupaten/ kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti. Indikator Kinerja = X/Y x 100%
	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, atau Non Alam	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	Rumus: X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di

		pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		daerah kota yang membutuhkan kebutuhan dasar/ Perlindungan Sosial **Indikator Kinerja = X/Y x 100%**

16. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Perumahan dan Permukiman Yang Layak Huni dan Didukung Dengan Ketersediaan Infrastruktur Permukiman Yang Inklusif dan Berkualitas		Indeks Infrastruktur Permukiman	Persen	Formula Perhitungan Indeks Infrastruktur Permukiman : % Jalan Lingkungan + % Drainase Lingkungan + % RTP + % Penanganan Rutilahu Jumlah Komponen Infrastruktur Permukiman yang masuk Perhitungan
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh Secara Terpadu	Luas Kawasan Kumuh yang di tangani secara terpadu	Hektar (Ha)	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani secara terpadu dibagi Luas Total Kawasan Kumuh
	Terpenuhinya Hunian Layak yang Terjangkau dan Didukung Oleh PSU yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	Persentase Rumah Tangga (KK) dengan hunian layak dibagi jumlah rumah tangga (KK) dikali 100

	Terwujudnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang profesional dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

17. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Mewujudkan ekosistem dan ruang pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, serta meningkatkan daya beli serta ketahanan pangan, dan mengoptimalkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	PDRB sektor pertanian dibagi total PDR dikali 100%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan, selaras dengan upaya pelestarian laut dan keanekaragaman hayati, demi mendorong peningkatan konsumsi ikan di kalangan masyarakat.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	**1. Perhitungan Jumlah Produksi Berdasarkan Volume (Tonase)** $$JP = \sum_{i=1}^{n} (Q_i)$$ **Keterangan:** • JP = Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) • Q_i = Volume hasil tangkapan per trip atau per jenis ikan (kg atau ton) • n = Jumlah total trip atau jumlah spesies yang dihitung Menjumlahkan seluruh hasil tangkapan (Qi), baik per trip

				penangkapan maupun per jenis ikan, hingga jumlah total trip atau jenis ikan yang ada (n)
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	**1. Perhitungan Jumlah Produksi Berdasarkan Volume Panen** $$JP = \sum_{i=1}^{n} (Q_i)$$ **Keterangan:** • JP = Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (kg atau ton) • Q_i = Volume hasil panen per spesies atau unit budidaya (kg atau ton) • n = Jumlah total unit budidaya yang dihitung Menjumlahkan seluruh hasil panen (Qi) dari setiap unit budidaya (misalnya kolam, keramba, tambak) atau dari setiap jenis spesies ikan yang dibudidayakan, sampai jumlah unit budidaya yang ada (n).
	Peningkatan distribusi dan kualitas sarana pertanian yang didukung oleh penguatan prasarana pertanian serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang efektif, serta penanggulangan bencana pertanian yang responsif. Upaya ini diiringi dengan kemudahan perizinan usaha pertanian dan peningkatan kapasitas sumber	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%) = (produksi tahun berjalan dikurangi produksi tahun dasar) dibagi produksi tahun dasar dikali 100%
		Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	Peningkatan Produksi Holtikultura (%) = (produksi tahun berjalan dikurangi produksi tahun dasar) dibagi produksi tahun dasar dikali 100%

	daya manusia di bidang penyuluhan pertanian.			
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang diiringi dengan penguatan penanganan daerah rawan pangan serta intensifikasi pengawasan mutu dan keamanan pangan.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	**Secara Konsep, rumus PoU menurut FAO adalah:** $$PoU = \int_0^L f(z)\,dz$$ **Dengan:** • $f(x)$ = fungsi distribusi konsumsi energi pangan per kapita (biasanya diasumsikan berdistribusi log-normal) • x = konsumsi energi pangan (kkal/kapita/hari) • L = batas bawah kebutuhan energi minimum (MDER) **Secara praktis, PoU dihitung sebagai:** $$PoU = \frac{\text{Jumlah penduduk dengan konsumsi energi} < \text{MDER}}{\text{Jumlah total penduduk}} \times 100\%$$ (jumlah penduduk dengan konsumsi energi < MDER) dibagi jumlah total penduduk dikali 100%

18. DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pelayanan lalulintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.		Indeks Infrastruktur Perhubungan	Poin	(Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan terpasang pada jalan kota / Jumlah Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Kota) x 100 %
	Terwujudnya Kinerja Perangkat daerah yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Wilayah	Poin	*Jumlah trayek angkutan umum yang beroperasi : Jumlah kebutuhan trayek angkutan umum di Kota Cilegon (cara perhitungan belum ada)*

19. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum	Nilai	$I_{IPKKU} = \sum_{n}^{i}(WD^{i} \times WS_{n}^{i} \times S_{n}^{i})$ Indikator trantibumlinmas sub urusan trantibum = Sigma dari nilai bobot pada dimensi ke I x Nilai bobot pada sub dimensi ke-n dimensi ke-I x Nilai rata-rata skala likert pada indikator I sub dimensi ke dimensi ke-I / Jumlah skala likert yang digunakan
	Terwujudnya Kinerja Satpol PP yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan

				publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang Aman dan Kondusif	Tercapainya Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum Kategori Baik	Daerah	$I_{IPKKU} = \sum_{n}^{i}(WD^{i} \; x \; WS_{n}^{i} \; x \; S_{n}^{i})$ Indikator trantibumlinmas sub urusan trantibum = Sigma dari nilai bobot pada dimensi ke I x Nilai bobot pada sub dimensi ke-n dimensi ke-I x Nilai rata-rata skala likert pada indikator I sub dimensi ke dimensi ke-I / Jumlah skala likert yang digunakan Dari Perhitungan Indeks selanjutnya mengkategorikan IPKKU dalam jangkauan nilai lebih dari 60,00
		Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	(Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100%

		Terpenuhinya Capaian Mutu Layanan SPM Sub Urusan Trantibum	Daerah	Nilai rata-rata persentase indeks pencapaian mutu dikalikan bobot mutu, dan persentase indeks penerima layanan dikalikan bobot penerima

20. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tranformasi layanan Publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan Informasi		Indeks Pemerintahan Digital	Poin	Perhitungan Skor DGI = ∑(Nilai Subkomponen x Bobotnya) Total skor berada dalam rentang 0–100. Rererensi : Keputusan Menteri PANRB No. 108 Tahun 2023 tentang Kerangka Indeks Pemerintahan Digital (Digital Government Index/DGI)
	Terwujudnya Kinerja Dinas Kominfo Statistik dan Persandian yang akuntabel dan Profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persen	Penilaian keterbukaan informasi publik biasanya dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan monitoring, yang melibatkan berbagai faktor seperti:Pelaksanaan Penyediaan Informasi, Tingkat Aksesbilitas, Transparasi dan Akuntabilitas, Penyediaan Informasi yang dikecualikan, Partisipasi Publik Nilai KIP=∑(Ii×Wi)∑Wi×100 Nilai KIP=∑Wi∑(Ii×Wi)×100 Keterangan: IiIi: Nilai indikator ke-i (skala 0–100) WiWi: Bobot indikator ke-i (misalnya dalam %) ∑Wi∑Wi: Jumlah bobot keseluruhan (biasanya 100%) Hasil akhir dinyatakan dalam bentuk persentase (%)

	Meningkatnya layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Pemerintah Digital	Poin	Indeks Kematangan Pemerintah Digital (Indeks Kematangan Teknologi dan Layanan Digital Pemerintah) = ((0,25 x Pembangunan/Pengembangan Aplikasi) + (0,25 x Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional) + (0,25 x Layanan Jaringan Intra Pemerintah + (0,25 x Pemanfaatan Teknologi Baru)+ (0,13 x Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan)+ (0,20 x Layanan Administrasi Pemerintahan + (0,13 x Pemanfaatan Portal Nasional Administrasi Pemerintahan)+ (0,20 x Keterpaduan Pelayanan Publik Digital)+ (0,13 x Pemanfaatan Portal Nasional Pelayanan Publik)+ (0,20 xPemanfaatan Identitas Digital

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Nasional)/2)

Indeks Kematangan Pemerintah Digital =∑Wi∑(Ii ×Wi)

Keterangan:
Ii: Skor indikator ke-i (misalnya dari skala 1–5 atau 0–1)
wi: Bobot indikator ke-i (berdasarkan prioritas dan kontribusinya)

<table>
<tr><th>Tingkat Kematangan</th><th>Kriteria</th><th>Penjelasan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rintisan</td><td>Implementasi tanpa pedoman dan tanpa perencanaan yang terarah</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Terkelola</td><td>Implementasi sesuai pedoman dan program yang terarah, namun belum komprehensif untuk semua proses dan lingkup</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Terstandarisasi</td><td>Implementasi secara komprehensif untuk semua proses dan lingkup sesuai pedoman dan program yang terarah</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Terintegrasi/Terpadu dan Terukur</td><td>Implementasi integrasi/keterpaduan nasional, dilakukan review/evaluasi berkala</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Optimum</td><td>Optimalisasi kapabilitas implementasi berdasarkan hasil review/evaluasi</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Meningkatnya Kualitas dan Pemanfatan Data Statistik Sektoral dan Spasial</td>
<td>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</td>
<td>Poin</td>
<td>Nilai indeks pembangunan statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot</td>
</tr>
</table>

				Domain Indeks Pembangunan Statistik = K ∑ Bobot Domaink X Nilai Domaink K=1 dengan K adalah banyaknya domain penilaian; Bobot Domain K adalah nilai bobot domain ke -K; Nilai Domain K adalah indeks domain ke -K;
	Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Persen	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan informasi pada Dinas Kominfo, mencakup aspek-aspek keamanan informasi yang penting untuk melindungi data dan sistem informasi. Indeks KAMI = (0,2 x Kebijakan Keamanan Informasi) + (0,2 x Organisasi dan Manajemen Keamanan) + (0,25 x Keamanan Infrastruktur) + (0,25 x Keamanan Aplikasi) + (0,1 x Manajemen Risiko)

				Skor Indeks KAMI Total=∑(Si×Wi) Keterangan: SiSi: Skor indikator/subaspek ke-i (biasanya skala 0–4) WiWi: Bobot dari masing-masing subaspek Skor total adalah hasil penjumlahan seluruh skor subaspek yang telah dikalikan bobotnya Skala Indeks KAMI berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Keamanan Informasi. bersifat kuantitatif dan dikategorikan ke dalam tingkat kematangan (maturity level), yaitu: Total Skor Indeks KAMI Level Kematangan Makna

				0 – 300 Sangat Rendah Belum ada penerapan keamanan informasi. 301 – 500 Rendah Baru inisiatif awal, belum sistematis. 501 – 700 Sedang Sudah ada kebijakan dan penerapan terbatas. 701 – 875 Tinggi Penerapan menyeluruh namun belum optimal. 876 – 1000 Sangat Tinggi Penerapan optimal dan berkelanjutan.

21. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Pelayanan Publik	Poin	IPP = 0,24*skor aspek kebijakan pelayanan + 0,25*skor aspek profesionalisme + 0,18*skor aspek sarana prasarana + 0,11*skor aspek sistem informasi pelayanan publik + 0,1*skor nilai konsultasi dan pengaduan + 0,12*skor nilai inovasi pelayanan; Skor aspek adalah jumlah skor indikator pada masing-masing aspek, dengan bobot nilai indikator sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kategori indeks pelayanan publik :

				0,00 - 1,00 , kategori F, makna gagal 1,01 - 1,50, kategori E, makna sangat buruk 1,51 - 2,00, kategori D, makna buruk 1,51 - 2,00, kategori C-, makna cukup (dengan catatan) 2,51 - 3,00, kategori C, makna cukup 3,01 - 3,50. kategoir B-, makna baik (dengan catatan) 3,51 - 4,00, kategori B, makna baik 4,01 - 5,50, kategori A-, makna sangat baik 4,51- 5,00, kategori A, makna pelayanan prima
	Terwujudnya Kinerja Disdukcapil yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan

				publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Layanan Pendaftaran Penduduk yang Profesional	Persentase Kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen	1. Perekaman KTP-el : jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP-el dibagi jumlah penduduk wajib KTP (penduduk 17 tahun keatas) dikalikan 100% 2. Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan: Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah total anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KIA dikalikan 100% 3. Cakupan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon : Jumlah Surat Keterangan Pindah Keluar yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon dikalikan 100%

				4. Cakupan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT): Jumlah SKTT yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan SKTT dikalikan100% 5. Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD): Jumlah penduduk dengan kepemilikan IKD dibagi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP-el dikalikan 100%
	Terwujudnya Layanan Pencatatan Sipil yang Profesional	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	Persen	1. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan : Jumlah pendudukusia 0 s.d 17 tahun dengan Akta Kelahiran dibagi Jumlah total penduduk usia 0 s.d 17 tahun dikalikan 100% 2. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan:

				Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan dibagi jumlah total peristiwa kematian yang dilaporkan dikalikan 100% 3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan: Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dibagi Jumlah total pasangan yang perkawinannya dilaporkan dikalikan 100% 4. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan: Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan dibagi jumlah total peristiwa perceraian yang dilaporkan dikalikan 100%
	Terwujudnya Pengelolaan Informasi	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	Persen	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan

	Administrasi Kependudukan yang Profesional	kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama		Perjanjian Kerjasama atau berdasarkan surat permohonan terhadap Jumlah OPD dan lembaga lintas sektoral lainnya (42 OPD dan lembaga lintas sektoral lainnya)
	Terwujudnya Pengelolaan Profil Kependudukan yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Persen	Jumlah jenis data profil yang tersedia dibagi dengan jumlah jenis data yang seharusnya tersedia (63 jenis data) dikali 100%

22. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Berkurangnya Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	'Risk = Hazard dikali (vulnerability dibagi capacity) keterangan : hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya
	Meningkatnya Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Korban Kebakaran adalah rata-rata persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan perhitungan:

				(Capaian layanan pemadam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan Tingkat waktu tanggap (respon time) + Capaian layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam Tingkat waktu tanggap (respon time) oleh BALAKAR) 2
		Persentase layanan penyelamatan, dan evakuasi kejadian non kebakaran	Persen	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X dibagi total kejadian non kebakaran

23. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya koperasi dan UMKM yang berdaya saing		Kontribusi Koperasi Terhadap PDRB	Persen	(pendapatan koperasi dibagi PDRB) dikali 100%
		Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	(jumlah pendapatan atau omset pelaku usaha mikro pada database UMKM tahun n dibagi PDRB tahun n) dikali 100%
	Meningkatnya koperasi sehat sesuai kewenangan kota/kab	Persentase Koperasi Sehat	Persen	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibagi jumlah koperasi yang RAT kewenangan kab/kota dikali 100%
	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi	Persen	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan dikali

		Wirausaha		100%
	Terwujudnya kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

24. DINAS TENAGA KERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tenaga kerja yang Berdaya Saing dan Perlindungan Ketenagakerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Mengacu pada publikasi sakernas Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran (usia angkatan kerja tetapi belum bekerja) dibagi jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja) dikali 100%
	Meningkatnya Penempatan dan Perlindungan Tenaga	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten /	Persen	Pencari kerja yang Ditempatkan / Pencari kerja yang terdaftar)*100% Pencari kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) baik melalui pelatihan serta yang Dimagangkan dibagi Pencari

		kota		kerja yang terdaftar dikali 100%
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100%
	Terwujudnya Kinerja Dinas Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

25. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya pertumbuhan industri dan perdagangan daerah yang berdaya saing inklusif dan berkelanjutan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	(PDRB Sektor Perdagangan/ Total PDRB) x 100% PDRB Sektor Perdagangan: Perdagangan Besar dan Eceran
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	(PDRB Sektor industri/Total PDRB) x 100% PDRB Sektor rindustri: Industri Pengolahan
	Terwujudnya Kinerja Dinas Perindustrian	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi

	dan Perdagangan yang Akuntabel dan Profesional	Daerah		kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Indeks Harga Konsumen (IHK)	Poin	Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember Tahun N (*Hasil Publish BPS*) harga barang atau jasa tahun berjalan x bobot pengeluaran masing-masing pengeluaran atau jasa)/ harga barang dan jasa pada tahun dasar x bobot pengeluaran masing-masing pengeluaran atau jasa) x 100%
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen	((Jumlah IKM tahun N- Jumlah IKM tahun N-1)/ Jumlah IKM tahun N-1) x 100%

26. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya iklim investasi yang kondusif		Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	((Realisasi investasi tahun n - Realisasi investasi tahun n-1) / Realisasi investasi tahun n-1)*100%
	Terwujudnya kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akuntabel dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

	Meningkatnya investasi daerah	Realisasi Investasi	Rupiah per Tahun	Realisasi Investasi PMA dan PMDN pada Tahun n

27. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya generasi muda dan pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	Perhitungan IPP merupakan hasil survey, yang mencakup 5 domain dan 15 indikator
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	(PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman Harga Konstan 2010 : Total PDRB)*dikali 100% *kenaikan 2,5% per tahun
	Terwujudnya generasi muda dan olahraga yang berkualitas dan berdaya saing	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	(Jumlah Wirausaha Muda dibagi Total Angkatan Kerja) x 100%
		Tingkat Prestasi Olahraga	Persen	(Jumlah nomor pertandingan yang berprestasi pada seluruh cabang olahraga dibagi jumlah nomor pertandingan olahraga pada seluruh cabang olahraga yang diikuti minimal di tingkat

				Provinsi) x 100%
	Terwujudnya potensi wisata yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berjalan. *Diproyeksikan terdapat kenaikan jumlah kunjungan sebesar 5% pertahun
	Terwujudnya kinerja Disporapar yang akuntabel dan profesional	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

28. KECAMATAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan		Skor Penilaian Kecamatan	Poin	Skor Kecamatan = $\sum(Bobot_i \times Nilai_i)/\sum Bobot_i$ dengan keterangan: $Nilai_i$ = skor capaian indikator ke-i (skala bisa 0–100) $Bobot_i$ = bobot kepentingan indikator ke-i (jumlah total bobot = 100%) Range nilai : 91 - 100 -- Unggul 80 - 90,99 -- Sangat Baik 65 - 79,99 -- Baik 50,00 - 64,99 -- Cukup <50,00 – Kurang

	Terwujudnya Kinerja Kecamatan yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	Rumus : (X/Y)*100% X = Jumlah Kelurahan Cepat Berkembang di Wilayah Kecamatan Y = Jumlah Kelurahan yang Ada di Wilayah Kecamatan

WALI KOTA CILEGON,

ROBINSAR

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KOTA CILEGON

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01 - KECAMATAN				31.596.631.358,00		32.900.666.261,00		34.290.503.991,00		35.818.562.864,00		35.818.562.863,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.804.768.568,00		17.103.147.471,00		17.424.648.350,00		17.753.550.899,00		17.753.550.899,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	60	5.344.049.229,00	61	5.365.638.007,00	62	5.402.663.011,00	63	5.440.676.560,00	63	5.440.676.560,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JOMBANG	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	5		5		5		5		5			
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	60		65		75		85		90			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				14.190.000,00		14.190.000,00		14.900.000,00		14.900.000,00		14.900.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	14.190.000,00	1	14.190.000,00	1	14.900.000,00	1	14.900.000,00	1	14.900.000,00		
7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				14.190.000,00		14.190.000,00		14.900.000,00		14.900.000,00		14.900.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	14.190.000,00	1	14.190.000,00	1	14.900.000,00	1	14.900.000,00	1	14.900.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				102.700.000,00		107.030.000,00		112.050.000,00		116.810.000,00		116.810.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	102.700.000,00	1	107.030.000,00	1	112.050.000,00	1	116.810.000,00	1	116.810.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000,00		4.610.000,00		4.730.000,00		4.850.000,00		4.850.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.500.000,00	1	4.610.000,00	1	4.730.000,00	1	4.850.000,00	1	4.850.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		31.500.000,00		33.080.000,00		34.730.000,00		34.730.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	30.000.000,00	4	31.500.000,00	4	33.080.000,00	4	34.730.000,00	4	34.730.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		10.250.000,00		10.510.000,00		10.770.000,00		10.770.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	10.250.000,00	1	10.510.000,00	1	10.770.000,00	1	10.770.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000,00		15.750.000,00		16.540.000,00		17.370.000,00		17.370.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	15.000.000,00	3	15.750.000,00	3	16.540.000,00	3	17.370.000,00	3	17.370.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.500.000,00		11.030.000,00		11.580.000,00		11.580.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	10.000.000,00	3	10.500.000,00	3	11.030.000,00	3	11.580.000,00	3	11.580.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.900.000,00		11.450.000,00		12.030.000,00		12.640.000,00		12.640.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	10.900.000,00	12	11.450.000,00	12	12.030.000,00	12	12.640.000,00	12	12.640.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.960.000,00		8.960.000,00		9.410.000,00		9.410.000,00		9.410.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	8.960.000,00	12	8.960.000,00	12	9.410.000,00	12	9.410.000,00	12	9.410.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8.080.000,00		8.490.000,00		8.920.000,00		9.370.000,00		9.370.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	8.080.000,00	1	8.490.000,00	1	8.920.000,00	1	9.370.000,00	1	9.370.000,00		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.260.000,00		5.520.000,00		5.800.000,00		6.090.000,00		6.090.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.260.000,00	1	5.520.000,00	1	5.800.000,00	1	6.090.000,00	1	6.090.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				15.000.000,00		15.800.000,00		16.500.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	15.000.000,00	2	15.800.000,00	2	16.500.000,00	2	18.000.000,00	2	18.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000,00		15.800.000,00		16.500.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	15.000.000,00	2	15.800.000,00	2	16.500.000,00	2	18.000.000,00	2	18.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.167.040.000,00		2.168.230.000,00		2.173.150.000,00		2.178.320.000,00		2.178.320.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.167.040.000,00	1	2.168.230.000,00	1	2.173.150.000,00	1	2.178.320.000,00	1	2.178.320.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		0		0		0		0			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				93.750.000,00		98.440.000,00		103.360.000,00		108.530.000,00		108.530.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	93.750.000,00	12	98.440.000,00	12	103.360.000,00	12	108.530.000,00	12	108.530.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.059.790.000,00		2.059.790.000,00		2.059.790.000,00		2.059.790.000,00		2.059.790.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.059.790.000,00	12	2.059.790.000,00	12	2.059.790.000,00	12	2.059.790.000,00	12	2.059.790.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				316.129.229,00		318.528.007,00		320.303.011,00		321.916.560,00		321.916.560,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	316.129.229,00	0	318.528.007,00	0	320.303.011,00	0	321.916.560,00	0	321.916.560,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	17		17		17		17		17			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				116.410.000,00		136.410.000,00		136.410.000,00		136.410.000,00		136.410.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	17	116.410.000,00	17	136.410.000,00	17	136.410.000,00	17	136.410.000,00	17	136.410.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.200.000,00		15.660.000,00		16.130.000,00		16.620.000,00		16.620.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18	15.200.000,00	18	15.660.000,00	18	16.130.000,00	18	16.620.000,00	18	16.620.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				164.519.229,00		166.458.007,00		167.763.011,00		168.886.560,00		168.886.560,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	164.519.229,00	1	166.458.007,00	1	167.763.011,00	1	168.886.560,00	1	168.886.560,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	60	5.344.049.229,00	61	5.365.638.007,00	62	5.402.663.011,00	63	5.440.676.560,00	65	5.440.676.560,00	7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN JOMBANG WETAN	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	5		5		5		5		5			
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	60		65		70		85		90			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.400.000,00		47.510.000,00		49.710.000,00		52.020.000,00		52.020.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	6	45.400.000,00	6	47.510.000,00	6	49.710.000,00	6	52.020.000,00	6	52.020.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.050.000,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	6	2.000.000,00	6	2.050.000,00	6	2.100.000,00	6	2.150.000,00	6	2.150.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		15.750.000,00		16.540.000,00		17.370.000,00		17.370.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.540.000,00	1	17.370.000,00	1	17.370.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.130.000,00		5.260.000,00		5.390.000,00		5.390.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.130.000,00	1	5.260.000,00	1	5.390.000,00	1	5.390.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000,00		7.880.000,00		8.270.000,00		8.680.000,00		8.680.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000,00	1	7.880.000,00	1	8.270.000,00	1	8.680.000,00	1	8.680.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		5.790.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	5.790.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.900.000,00		11.450.000,00		12.030.000,00		12.640.000,00		12.640.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1	10.900.000,00	1	11.450.000,00	1	12.030.000,00	1	12.640.000,00	1	12.640.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				506.330.000,00		505.740.000,00		507.230.000,00		508.800.000,00		508.800.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	506.330.000,00	12	505.740.000,00	12	507.230.000,00	12	508.800.000,00	12	508.800.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12		0		0		0		0			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	12	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				28.460.000,00		29.880.000,00		31.370.000,00		32.940.000,00		32.940.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	28.460.000,00	12	29.880.000,00	12	31.370.000,00	12	32.940.000,00	12	32.940.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				475.870.000,00		475.860.000,00		475.860.000,00		475.860.000,00		475.860.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	475.870.000,00	12	475.860.000,00	12	475.860.000,00	12	475.860.000,00	12	475.860.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.700.000,00		73.410.000,00		74.140.000,00		74.880.000,00		74.880.000,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	72.700.000,00	1	73.410.000,00	1	74.140.000,00	1	74.880.000,00	1	74.880.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	21		21		21		21		21			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.800.000,00		11.130.000,00		11.470.000,00		11.820.000,00		11.820.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	21	10.800.000,00	21	11.130.000,00	21	11.470.000,00	21	11.820.000,00	21	11.820.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.500.000,00		12.880.000,00		13.270.000,00		13.660.000,00		13.660.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	12.500.000,00	1	12.880.000,00	1	13.270.000,00	1	13.660.000,00	1	13.660.000,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	5	5.344.049.229,00	5	5.365.638.007,00	5	5.402.663.011,00	5	5.440.676.560,00	5	5.440.676.560,00	7.01.0.00.0.00.07.0002 - KELURAHAN MASIGIT	
	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	60		61		62		63		65			
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	60		65		75		85		90			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.400.000,00		47.510.000,00		49.710.000,00		52.020.000,00		52.020.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	45.400.000,00	4	47.510.000,00	4	49.710.000,00	4	52.020.000,00	4	52.020.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.050.000,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2.000.000,00	2	2.050.000,00	2	2.100.000,00	2	2.150.000,00	2	2.150.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		15.750.000,00		16.540.000,00		17.370.000,00		17.370.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	15.000.000,00	2	15.750.000,00	2	16.540.000,00	2	17.370.000,00	2	17.370.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.130.000,00		5.260.000,00		5.390.000,00		5.390.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	5.000.000,00	2	5.130.000,00	2	5.260.000,00	2	5.390.000,00	2	5.390.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000,00		7.880.000,00		8.270.000,00		8.680.000,00		8.680.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	7.500.000,00	4	7.880.000,00	4	8.270.000,00	4	8.680.000,00	4	8.680.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		5.790.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	5.790.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.900.000,00		11.450.000,00		12.030.000,00		12.640.000,00		12.640.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	10.900.000,00	12	11.450.000,00	12	12.030.000,00	12	12.640.000,00	12	12.640.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				402.040.000,00		401.320.000,00		402.680.000,00		404.110.000,00		404.110.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	402.040.000,00	0	401.320.000,00	0	402.680.000,00	0	404.110.000,00	0	404.110.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				25.890.000,00		27.180.000,00		28.540.000,00		29.970.000,00		29.970.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	25.890.000,00	12	27.180.000,00	12	28.540.000,00	12	29.970.000,00	12	29.970.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				374.150.000,00		374.140.000,00		374.140.000,00		374.140.000,00		374.140.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	374.150.000,00	12	374.140.000,00	12	374.140.000,00	12	374.140.000,00	12	374.140.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.000.000,00		75.780.000,00		76.580.000,00		77.400.000,00		77.400.000,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	75.000.000,00	1	75.780.000,00	1	76.580.000,00	1	77.400.000,00	1	77.400.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	49.400.000,00	6	49.400.000,00	6	49.400.000,00	6	49.400.000,00	6	49.400.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.800.000,00		11.130.000,00		11.470.000,00		11.820.000,00		11.820.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	10.800.000,00	4	11.130.000,00	4	11.470.000,00	4	11.820.000,00	4	11.820.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				14.800.000,00		15.250.000,00		15.710.000,00		16.180.000,00		16.180.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	14.800.000,00	1	15.250.000,00	1	15.710.000,00	1	16.180.000,00	1	16.180.000,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	60	5.344.049.229,00	61	5.365.638.007,00	62	5.402.663.011,00	63	5.440.676.560,00	65	5.440.676.560,00	7.01.0.00.0.00.07.0003 - KELURAHAN SUKMAJAYA	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	5		5		5		5		5			
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	66		65		75		85		90			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.400.000,00		47.510.000,00		49.710.000,00		52.020.000,00		52.020.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	45.400.000,00	1	47.510.000,00	1	49.710.000,00	1	52.020.000,00	1	52.020.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.050.000,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	2.000.000,00	1	2.050.000,00	1	2.100.000,00	1	2.150.000,00	1	2.150.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		15.750.000,00		16.540.000,00		17.370.000,00		17.370.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	15.000.000,00	4	15.750.000,00	4	16.540.000,00	4	17.370.000,00	4	17.370.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.130.000,00		5.260.000,00		5.390.000,00		5.390.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.130.000,00	1	5.260.000,00	1	5.390.000,00	1	5.390.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000,00		7.880.000,00		8.270.000,00		8.680.000,00		8.680.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000,00	1	7.880.000,00	1	8.270.000,00	1	8.680.000,00	1	8.680.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		5.790.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	5.790.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.900.000,00		11.450.000,00		12.030.000,00		12.640.000,00		12.640.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1	10.900.000,00	1	11.450.000,00	1	12.030.000,00	1	12.640.000,00	1	12.640.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				351.760.000,00		351.260.000,00		352.840.000,00		354.500.000,00		354.500.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	351.760.000,00	12	351.260.000,00	12	352.840.000,00	12	354.500.000,00	12	354.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.020.000,00		31.520.000,00		33.100.000,00		34.760.000,00		34.760.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.020.000,00	12	31.520.000,00	12	33.100.000,00	12	34.760.000,00	12	34.760.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				319.740.000,00		319.740.000,00		319.740.000,00		319.740.000,00		319.740.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	319.740.000,00	12	319.740.000,00	12	319.740.000,00	12	319.740.000,00	12	319.740.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.200.000,00		78.040.000,00		78.910.000,00		79.800.000,00		79.800.000,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	77.200.000,00	1	78.040.000,00	1	78.910.000,00	1	79.800.000,00	1	79.800.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	10		10		10		10		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.800.000,00		11.130.000,00		11.470.000,00		11.820.000,00		11.820.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	10.800.000,00	3	11.130.000,00	3	11.470.000,00	3	11.820.000,00	3	11.820.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				17.000.000,00		17.510.000,00		18.040.000,00		18.580.000,00		18.580.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	17.000.000,00	1	17.510.000,00	1	18.040.000,00	1	18.580.000,00	1	18.580.000,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	60	5.344.049.229,00	61	5.365.638.007,00	62	5.402.663.011,00	63	5.440.676.560,00	63	5.440.676.560,00	7.01.0.00.0.00.07.0004 - KELURAHAN PANGGUNG RAWI	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	5		5		5		5		5			
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	60		65		75		85		90			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.400.000,00		47.510.000,00		49.710.000,00		52.020.000,00		52.020.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	45.400.000,00	1	47.510.000,00	1	49.710.000,00	1	52.020.000,00	1	52.020.000,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.050.000,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5	2.000.000,00	5	2.050.000,00	5	2.100.000,00	5	2.150.000,00	5	2.150.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		15.750.000,00		16.540.000,00		17.370.000,00		17.370.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	15.000.000,00	1	15.750.000,00	1	16.540.000,00	1	17.370.000,00	1	17.370.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.130.000,00		5.260.000,00		5.390.000,00		5.390.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000,00	1	5.130.000,00	1	5.260.000,00	1	5.390.000,00	1	5.390.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000,00		7.880.000,00		8.270.000,00		8.680.000,00		8.680.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	1	7.500.000,00	1	7.880.000,00	1	8.270.000,00	1	8.680.000,00	1	8.680.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		5.790.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000,00	1	5.250.000,00	1	5.510.000,00	1	5.790.000,00	1	5.790.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.900.000,00		11.450.000,00		12.030.000,00		12.640.000,00		12.640.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	10.900.000,00	1	11.450.000,00	1	12.030.000,00	1	12.640.000,00	1	12.640.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				377.510.000,00		377.860.000,00		380.340.000,00		382.940.000,00		382.940.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	377.510.000,00	0	377.860.000,00	0	380.340.000,00	0	382.940.000,00	0	382.940.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	44	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				47.220.000,00		49.580.000,00		52.060.000,00		54.660.000,00		54.660.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	44	1	47.220.000,00	1	49.580.000,00	1	52.060.000,00	1	54.660.000,00	1	54.660.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				328.290.000,00		328.280.000,00		328.280.000,00		328.280.000,00		328.280.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	328.290.000,00	12	328.280.000,00	12	328.280.000,00	12	328.280.000,00	12	328.280.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.700.000,00		87.830.000,00		88.990.000,00		90.180.000,00		90.180.000,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	1	86.700.000,00	1	87.830.000,00	1	88.990.000,00	1	90.180.000,00	1	90.180.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34.393.097	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34.393.097	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00	10	49.400.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.800.000,00		11.130.000,00		11.470.000,00		11.820.000,00		11.820.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	1	10.800.000,00	1	11.130.000,00	1	11.470.000,00	1	11.820.000,00	1	11.820.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				26.500.000,00		27.300.000,00		28.120.000,00		28.960.000,00		28.960.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	26.500.000,00	1	27.300.000,00	1	28.120.000,00	1	28.960.000,00	1	28.960.000,00		
Meningkatnya kualitas Layanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik dan termanfaatkan (%)	0	60	5.344.049.229,00	61	5.365.638.007,00	62	5.402.663.011,00	63	5.440.676.560,00	65	5.440.676.560,00	7.01.0.00.0.00.07.0005 - KELURAHAN GEDONG DALEM	
	Tingkat Kepuasan Pegawai Perangkat Daerah (Skor)	0	3,5		3,8		4		4,5		4,5			
	Indeks Pelayanan Publik (poin)	0	5		5		5		5		5			
	Tingkat Penerapan SPBE Perangkat Daerah (Skor)	0	60		65		75		85		100			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				45.400.000,00		47.510.000,00		49.710.000,00		52.020.000,00		52.020.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	45.400.000,00	4	47.510.000,00	4	49.710.000,00	4	52.020.000,00	4	52.020.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.050.000,00		2.100.000,00		2.150.000,00		2.150.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	2.000.000,00	5	2.050.000,00	5	2.100.000,00	5	2.150.000,00	5	2.150.000,00		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		15.750.000,00		16.540.000,00		17.370.000,00		17.370.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	4	15.000.000,00	4	15.750.000,00	4	16.540.000,00	4	17.370.000,00	4	17.370.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.130.000,00		5.260.000,00		5.390.000,00		5.390.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	12	5.000.000,00	12	5.130.000,00	12	5.260.000,00	12	5.390.000,00	12	5.390.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7.500.000,00		7.880.000,00		8.270.000,00		8.680.000,00		8.680.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6	7.500.000,00	6	7.880.000,00	6	8.270.000,00	6	8.680.000,00	6	8.680.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.250.000,00		5.510.000,00		5.790.000,00		5.790.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	5.000.000,00	3	5.250.000,00	3	5.510.000,00	3	5.790.000,00	3	5.790.000,00		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.900.000,00		11.450.000,00		12.030.000,00		12.640.000,00		12.640.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	10.900.000,00	3	11.450.000,00	3	12.030.000,00	3	12.640.000,00	3	12.640.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				431.350.000,00		431.000.000,00		432.740.000,00		434.560.000,00		434.560.000,00		
Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300	200	431.350.000,00	0	431.000.000,00	0	432.740.000,00	0	434.560.000,00	0	434.560.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	300	200	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.090.000,00		34.740.000,00		36.480.000,00		38.300.000,00		38.300.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	33.090.000,00	12	34.740.000,00	12	36.480.000,00	12	38.300.000,00	12	38.300.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				396.260.000,00		396.260.000,00		396.260.000,00		396.260.000,00		396.260.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10	10	396.260.000,00	10	396.260.000,00	10	396.260.000,00	10	396.260.000,00	10	396.260.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				71.400.000,00		72.070.000,00		72.760.000,00		73.460.000,00		73.460.000,00		
Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	71.400.000,00	1	72.070.000,00	1	72.760.000,00	1	73.460.000,00	1	73.460.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		49.400.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	49.400.000,00	12	49.400.000,00	12	49.400.000,00	12	49.400.000,00	12	49.400.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.800.000,00		11.130.000,00		11.470.000,00		11.820.000,00		11.820.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	10.800.000,00	6	11.130.000,00	6	11.470.000,00	6	11.820.000,00	6	11.820.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.200.000,00		11.540.000,00		11.890.000,00		12.240.000,00		12.240.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	11.200.000,00	1	11.540.000,00	1	11.890.000,00	1	12.240.000,00	1	12.240.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	83,52	83,65	11.460.719.339,00	83,70	11.737.509.464,00	83,75	12.021.985.339,00	83,80	12.312.874.339,00	83,85	12.312.874.339,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JOMBANG	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	85		90		95		95		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94.800.000,00		97.200.000,00		100.390.000,00		102.970.000,00		102.970.000,00		
Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	94.800.000,00	1	97.200.000,00	1	100.390.000,00	1	102.970.000,00	1	102.970.000,00		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		4		3		3		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				28.420.000,00		29.840.000,00		31.330.000,00		32.900.000,00		32.900.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	28.420.000,00	4	29.840.000,00	3	31.330.000,00	3	32.900.000,00	4	32.900.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13.770.000,00		14.100.000,00		14.400.000,00		14.700.000,00		14.700.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	2	13.770.000,00	2	14.100.000,00	2	14.400.000,00	2	14.700.000,00	2	14.700.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.320.000,00		14.320.000,00		15.040.000,00		15.040.000,00		15.040.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	14.320.000,00	4	14.320.000,00	4	15.040.000,00	4	15.040.000,00	4	15.040.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.340.000,00		5.610.000,00		5.890.000,00		6.180.000,00		6.180.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.340.000,00	1	5.610.000,00	1	5.890.000,00	1	6.180.000,00	1	6.180.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				9.450.000,00		9.830.000,00		10.230.000,00		10.650.000,00		10.650.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	9.450.000,00	1	9.830.000,00	1	10.230.000,00	1	10.650.000,00	1	10.650.000,00		
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00	1	14.500.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.228.075.589,00		11.502.495.589,00		11.783.785.589,00		12.072.095.589,00		12.072.095.589,00		
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	11.228.075.589,00	12	11.502.495.589,00	12	11.783.785.589,00	12	12.072.095.589,00	12	12.072.095.589,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.684	1.848		1.848		1.848		1.848		1.848			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.189.655.589,00		11.464.075.589,00		11.745.365.589,00		12.033.675.589,00		12.033.675.589,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.684	1.848	11.189.655.589,00	1.848	11.464.075.589,00	1.848	11.745.365.589,00	1.848	12.033.675.589,00	1.848	12.033.675.589,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				28.420.000,00		28.420.000,00		28.420.000,00		28.420.000,00		28.420.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	28.420.000,00	12	28.420.000,00	12	28.420.000,00	12	28.420.000,00	12	28.420.000,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		6.800.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00	1	6.800.000,00		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				49.143.750,00		49.113.875,00		49.109.750,00		49.108.750,00		49.108.750,00		
Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	49.143.750,00	1	49.113.875,00	1	49.109.750,00	1	49.108.750,00	1	49.108.750,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.660.000,00		1.660.000,00		1.660.000,00		1.660.000,00		1.660.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1.660.000,00	1	1.660.000,00	1	1.660.000,00	1	1.660.000,00	1	1.660.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.940.000,00		1.940.000,00		1.940.000,00		1.940.000,00		1.940.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	12	1.940.000,00	12	1.940.000,00	12	1.940.000,00	12	1.940.000,00	12	1.940.000,00		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				45.543.750,00		45.513.875,00		45.509.750,00		45.508.750,00		45.508.750,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	45.543.750,00	12	45.513.875,00	12	45.509.750,00	12	45.508.750,00	12	45.508.750,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	83,52	83,65	11.460.719.339,00	83,70	11.737.509.464,00	83,75	12.021.985.339,00	83,80	12.312.874.339,00	83,85	12.312.874.339,00	7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN JOMBANG WETAN	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	85		90		95		95		100			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	83,52	83,65	11.460.719.339,00	83,70	11.737.509.464,00	83,75	12.021.985.339,00	83,80	12.312.874.339,00	83,85	12.312.874.339,00	7.01.0.00.0.00.07.0002 - KELURAHAN MASIGIT	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	85		90		95		95		100			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	83,52	83,65	11.460.719.339,00	83,70	11.737.509.464,00	83,75	12.021.985.339,00	83,80	12.312.874.339,00	83,85	12.312.874.339,00	7.01.0.00.0.00.07.0003 - KELURAHAN SUKMAJAYA	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	85		90		95		95		100			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	83,52	83,65	11.460.719.339,00	83,70	11.737.509.464,00	83,75	12.021.985.339,00	83,80	12.312.874.339,00	83,85	12.312.874.339,00	7.01.0.00.0.00.07.0004 - KELURAHAN PANGGUNG RAWI	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	85		90		95		95		100			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.930.000	1	17.740.000,00	1	17.740.000,00	1	17.740.000,00	1	17.740.000,00	1	17.740.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.930.000	1	17.740.000,00	1	17.740.000,00	1	17.740.000,00	1	17.740.000,00	1	17.740.000,00		
Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Kegiatan Serta Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	83,52	83,65	11.460.719.339,00	83,70	11.737.509.464,00	83,75	12.021.985.339,00	83,80	12.312.874.339,00	83,85	12.312.874.339,00	7.01.0.00.0.00.07.0005 - KELURAHAN GEDONG DALEM	
	Tingkat Kinerja Keuangan Perangkat Daerah (Skor)	0	85		90		95		95		100			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		17.740.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00	12	17.740.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Kecamatan/Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan) (poin)	91,76	91,85	55.000.000,00	91,90	55.000.000,00	92,00	55.000.000,00	92,10	55.000.000,00	92,25	55.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JOMBANG	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Capaian Kinerja Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				13.664.062.790,00		14.651.462.790,00		15.701.178.521,00		16.881.341.302,00		16.881.341.301,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keberdayaan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarpras lokal dan evaluasi kelurahan	Persentase lingkungan (RW) yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (%)	0	71	13.664.062.790,00	72	14.651.462.790,00	73	15.701.178.521,00	74	16.881.341.302,00	75	16.881.341.301,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JOMBANG	
	Persentase ketersediaan data sektoral kelurahan hasil koordinasi RW dan RT (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				301.342.000,00		301.342.000,00		301.342.000,00		301.342.000,00		301.342.000,00		
Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	38.807.000,00	6	38.807.000,00	6	38.807.000,00	6	38.807.000,00	6	38.807.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				26.068.000,00		26.068.000,00		26.068.000,00		26.068.000,00		26.068.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	26.068.000,00	6	26.068.000,00	6	26.068.000,00	6	26.068.000,00	6	26.068.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.739.000,00		12.739.000,00		12.739.000,00		12.739.000,00		12.739.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	3	4	12.739.000,00	4	12.739.000,00	4	12.739.000,00	4	12.739.000,00	4	12.739.000,00		
KP-2.2.10 Pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Jombang.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
KP-5.3.1 Pelaksanaan Gerakan lingkungan bersama masyarakat (Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	162.535.000,00	5	162.535.000,00	5	162.535.000,00	5	162.535.000,00	5	162.535.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				162.535.000,00		162.535.000,00		162.535.000,00		162.535.000,00		162.535.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	162.535.000,00	5	162.535.000,00	5	162.535.000,00	5	162.535.000,00	5	162.535.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				78.658.000,00		78.658.000,00		78.658.000,00		78.658.000,00		78.658.000,00		
Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	78.658.000,00	1	78.658.000,00	1	78.658.000,00	1	78.658.000,00	1	78.658.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	3	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				48.658.000,00		48.658.000,00		48.658.000,00		48.658.000,00		48.658.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	3	6	48.658.000,00	6	48.658.000,00	6	48.658.000,00	6	48.658.000,00	6	48.658.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Capaian Kinerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	50	20.000.000,00	0	20.000.000,00	50	20.000.000,00	0	20.000.000,00	50	20.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	50		0		50		0		50			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	0		50		0		50		0			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0		50		0		50		0			
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	0	50	10.000.000,00	0	0,00	50	10.000.000,00	0	0,00	50	10.000.000,00		
7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0	0	0,00	50	10.000.000,00	0	0,00	50	10.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0	50	10.000.000,00	0	0,00	50	10.000.000,00	0	0,00	50	10.000.000,00		
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	0	0,00	50	10.000.000,00	0	0,00	50	10.000.000,00	0	0,00		
Meningkatnya keberdayaan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarpras lokal dan evaluasi kelurahan	Persentase lingkungan (RW) yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (%)	0	71	13.664.062.790,00	72	14.651.462.790,00	73	15.701.178.521,00	74	16.881.341.302,00	75	16.881.341.301,00	7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN JOMBANG WETAN	
	Persentase ketersediaan data sektoral kelurahan hasil koordinasi RW dan RT (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.980.950.558,00		2.038.670.558,00		2.132.901.212,00		2.180.237.206,00		2.180.237.206,00		
Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	1.624.902.000,00	6	1.656.822.000,00	6	1.687.389.454,00	6	1.714.588.648,00	6	1.714.588.648,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				23.902.000,00		23.902.000,00		23.902.000,00		23.902.000,00		23.902.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	23.902.000,00	6	23.902.000,00	6	23.902.000,00	6	23.902.000,00	6	23.902.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.596.000.000,00		1.627.920.000,00		1.658.487.454,00		1.685.686.648,00		1.685.686.648,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7	7	1.596.000.000,00	7	1.627.920.000,00	7	1.658.487.454,00	7	1.685.686.648,00	7	1.685.686.648,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KP-5.3.1 Pelaksanaan Gerakan lingkungan bersama masyarakat (Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah) , KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat.	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	356.048.558,00	6	381.848.558,00	6	445.511.758,00	6	465.648.558,00	6	465.648.558,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				356.048.558,00		381.848.558,00		445.511.758,00		465.648.558,00		465.648.558,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	356.048.558,00	6	381.848.558,00	6	445.511.758,00	6	465.648.558,00	6	465.648.558,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.981.980.000,00		2.229.336.522,00		2.476.693.043,00		2.771.449.565,00		2.771.449.565,00		
Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ; KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	6	1.981.980.000,00	6	2.229.336.522,00	6	2.476.693.043,00	6	2.771.449.565,00	6	2.771.449.565,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.981.980.000,00		2.229.336.522,00		2.476.693.043,00		2.771.449.565,00		2.771.449.565,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	6	1.981.980.000,00	6	2.229.336.522,00	6	2.476.693.043,00	6	2.771.449.565,00	6	2.771.449.565,00		
Meningkatnya keberdayaan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarpras lokal dan evaluasi kelurahan	Persentase lingkungan (RW) yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (%)	0	71	13.664.062.790,00	72	14.651.462.790,00	73	15.701.178.521,00	74	16.881.341.302,00	75	16.881.341.301,00	7.01.0.00.0.00.07.0002 - KELURAHAN MASIGIT	
	Persentase ketersediaan data sektoral kelurahan hasil koordinasi RW dan RT (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.512.900.558,00		1.561.900.558,00		1.618.934.454,00		1.683.162.449,00		1.683.162.449,00		
Capaian Kinerja Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10	1.167.052.000,00	10	1.189.852.000,00	10	1.211.685.896,00	10	1.231.113.891,00	10	1.231.113.891,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				22.052.000,00		22.052.000,00		22.052.000,00		22.052.000,00		22.052.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	22.052.000,00	6	22.052.000,00	6	22.052.000,00	6	22.052.000,00	6	22.052.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.140.000.000,00		1.162.800.000,00		1.184.633.896,00		1.204.061.891,00		1.204.061.891,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	10	1.140.000.000,00	10	1.162.800.000,00	10	1.184.633.896,00	10	1.204.061.891,00	10	1.204.061.891,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
KP-5.3.1 Pelaksanaan Gerakan lingkungan bersama masyarakat (Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah) KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat.	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	345.848.558,00	6	372.048.558,00	6	407.248.558,00	6	452.048.558,00	6	452.048.558,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				345.848.558,00		372.048.558,00		407.248.558,00		452.048.558,00		452.048.558,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	345.848.558,00	6	372.048.558,00	6	407.248.558,00	6	452.048.558,00	6	452.048.558,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.375.380.000,00		1.544.058.261,00		1.712.736.522,00		1.918.614.783,00		1.918.614.783,00		
Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ; KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	6	1.375.380.000,00	6	1.544.058.261,00	6	1.712.736.522,00	6	1.918.614.783,00	6	1.918.614.783,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.375.380.000,00		1.544.058.261,00		1.712.736.522,00		1.918.614.783,00		1.918.614.783,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	6	1.375.380.000,00	6	1.544.058.261,00	6	1.712.736.522,00	6	1.918.614.783,00	6	1.918.614.783,00		
Meningkatnya keberdayaan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarpras lokal dan evaluasi kelurahan	Persentase lingkungan (RW) yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (%)	0	71	13.664.062.790,00	72	14.651.462.790,00	73	15.701.178.521,00	74	16.881.341.302,00	75	16.881.341.301,00	7.01.0.00.0.00.07.0003 - KELURAHAN SUKMAJAYA	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ketersediaan data sektoral kelurahan hasil koordinasi RW dan RT (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.108.664.558,00		1.140.024.558,00		1.177.308.285,00		1.218.307.882,00		1.218.307.882,00		
Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	4	824.016.000,00	4	839.976.000,00	4	855.259.727,00	4	868.859.324,00	4	868.859.324,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	17	7		7		7		7		7			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				21.016.000,00		21.016.000,00		21.016.000,00		21.016.000,00		21.016.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	21.016.000,00	6	21.016.000,00	6	21.016.000,00	6	21.016.000,00	6	21.016.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				798.000.000,00		813.960.000,00		829.243.727,00		842.843.324,00		842.843.324,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	17	7	798.000.000,00	7	813.960.000,00	7	829.243.727,00	7	842.843.324,00	7	842.843.324,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
KP-5.3.1 Pelaksanaan Gerakan lingkungan bersama masyarakat (Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah) , KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader Cllegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	284.648.558,00	6	300.048.558,00	6	322.048.558,00	6	349.448.558,00	6	349.448.558,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				284.648.558,00		300.048.558,00		322.048.558,00		349.448.558,00		349.448.558,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	284.648.558,00	6	300.048.558,00	6	322.048.558,00	6	349.448.558,00	6	349.448.558,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				970.980.000,00		1.087.510.435,00		1.204.040.870,00		1.343.971.304,00		1.343.971.304,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ; KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	6	970.980.000,00	6	1.087.510.435,00	6	1.204.040.870,00	6	1.343.971.304,00	6	1.343.971.304,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				970.980.000,00		1.087.510.435,00		1.204.040.870,00		1.343.971.304,00		1.343.971.304,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	6	970.980.000,00	6	1.087.510.435,00	6	1.204.040.870,00	6	1.343.971.304,00	6	1.343.971.304,00		
Meningkatnya keberdayaan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarpras lokal dan evaluasi kelurahan	Persentase lingkungan (RW) yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (%)	0	71	13.664.062.790,00	72	14.651.462.790,00	73	15.701.178.521,00	74	16.881.341.302,00	75	16.881.341.301,00	7.01.0.00.0.00.07.0004 - KELURAHAN PANGGUNG RAWI	
	Persentase ketersediaan data sektoral kelurahan hasil koordinasi RW dan RT (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.215.056.558,00		1.247.096.558,00		1.285.763.674,00		1.326.706.072,00		1.326.706.071,00		
Capaian Kinerja Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	938.608.000,00	4	956.848.000,00	4	974.315.116,00	4	989.857.513,00	4	989.857.513,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8	8		8		8		8		8			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				21.608.000,00		21.608.000,00		21.608.000,00		21.608.000,00		21.608.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	21.608.000,00	6	21.608.000,00	6	21.608.000,00	6	21.608.000,00	6	21.608.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				912.000.000,00		930.240.000,00		947.707.116,00		963.249.513,00		963.249.513,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	8	8	912.000.000,00	8	930.240.000,00	8	947.707.116,00	8	963.249.513,00	8	963.249.513,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KP-5.3.1 Pelaksanaan Gerakan Lingkungan Bersama Masyarakat (Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah) ; KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	276.448.558,00	6	290.248.558,00	6	311.448.558,00	6	336.848.559,00	6	336.848.558,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				276.448.558,00		290.248.558,00		311.448.558,00		336.848.559,00		336.848.558,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	276.448.558,00	6	290.248.558,00	6	311.448.558,00	6	336.848.559,00	6	336.848.558,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.196.580.000,00		1.342.223.478,00		1.487.866.957,00		1.664.110.435,00		1.664.110.435,00		
Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ; KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	6	1.196.580.000,00	6	1.342.223.478,00	6	1.487.866.957,00	6	1.664.110.435,00	6	1.664.110.435,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.196.580.000,00		1.342.223.478,00		1.487.866.957,00		1.664.110.435,00		1.664.110.435,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	0	6	1.196.580.000,00	6	1.342.223.478,00	6	1.487.866.957,00	6	1.664.110.435,00	6	1.664.110.435,00		
Meningkatnya keberdayaan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan sarpras lokal dan evaluasi kelurahan	Persentase lingkungan (RW) yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (%)	0	71	13.664.062.790,00	72	14.651.462.790,00	73	15.701.178.521,00	74	16.881.341.302,00	75	16.881.341.301,00	7.01.0.00.0.00.07.0005 - KELURAHAN GEDONG DALEM	
	Persentase ketersediaan data sektoral kelurahan hasil koordinasi RW dan RT (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				976.390.558,00		1.002.270.558,00		1.033.370.895,00		1.067.227.693,00		1.067.227.693,00		
Capaian Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	709.942.000,00	1	723.622.000,00	100	736.722.337,00	1	748.379.135,00	1	748.379.135,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	18	15		20		20		20		20			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20.942.000,00		20.942.000,00		20.942.000,00		20.942.000,00		20.942.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	20.942.000,00	6	20.942.000,00	6	20.942.000,00	6	20.942.000,00	6	20.942.000,00		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				684.000.000,00		697.680.000,00		710.780.337,00		722.437.135,00		722.437.135,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	18	15	684.000.000,00	20	697.680.000,00	20	710.780.337,00	20	722.437.135,00	20	722.437.135,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	100	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
KP-5.3.1 Pelaksanaan Gerakan lingkungan bersama masyarakat (Kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah) ; KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	266.448.558,00	6	278.648.558,00	6	296.648.558,00	6	318.848.558,00	6	318.848.558,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				266.448.558,00		278.648.558,00		296.648.558,00		318.848.558,00		318.848.558,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6	6	266.448.558,00	6	278.648.558,00	6	296.648.558,00	6	318.848.558,00	6	318.848.558,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				945.180.000,00		1.058.371.304,00		1.171.562.609,00		1.307.553.913,00		1.307.553.913,00		
Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan ; KP-6.2.1 Penguatan stimulus kinerja dan peran serta masyarakat dalam program pembangunan melalui pemberian tambahan honor kepada kader CIlegon Mandiri, pengurus RT & RW, guru honorer, guru madrasah, guru ngaji, ketua DKM, marbot,pemandi jenazah, pekerja sosial masyarakat, relawan bencana dan pengelola taman bacaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	945.180.000,00	6	1.058.371.304,00	6	1.171.562.609,00	6	1.307.553.913,00	6	1.307.553.913,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				945.180.000,00		1.058.371.304,00		1.171.562.609,00		1.307.553.913,00		1.307.553.913,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	945.180.000,00	6	1.058.371.304,00	6	1.171.562.609,00	6	1.307.553.913,00	6	1.307.553.913,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				972.800.000,00		991.056.000,00		1.009.677.120,00		1.028.670.663,00		1.028.670.663,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani (%)	100	100	972.800.000,00	100	991.056.000,00	100	1.009.677.120,00	100	1.028.670.663,00	100	1.028.670.663,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JOMBANG	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Capaian Kinerja Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				49.094.000,00		49.094.000,00		49.094.000,00		49.094.000,00		49.094.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	49.094.000,00	4	49.094.000,00	4	49.094.000,00	4	49.094.000,00	4	49.094.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10.906.000,00		10.906.000,00		10.906.000,00		10.906.000,00		10.906.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	4	10.906.000,00	4	10.906.000,00	4	10.906.000,00	4	10.906.000,00	4	10.906.000,00		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani (%)	100	100	972.800.000,00	100	991.056.000,00	100	1.009.677.120,00	100	1.028.670.663,00	100	1.028.670.663,00	7.01.0.00.0.00.07.0001 - KELURAHAN JOMBANG WETAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				222.400.000,00		226.848.000,00		231.384.960,00		236.012.659,00		236.012.659,00		
Capaian Kinerja Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	8	222.400.000,00	8	226.848.000,00	8	231.384.960,00	8	236.012.659,00	8	236.012.659,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				222.400.000,00		226.848.000,00		231.384.960,00		236.012.659,00		236.012.659,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	8	222.400.000,00	8	226.848.000,00	8	231.384.960,00	8	236.012.659,00	8	236.012.659,00		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani (%)	100	100	972.800.000,00	100	991.056.000,00	100	1.009.677.120,00	100	1.028.670.663,00	100	1.028.670.663,00	7.01.0.00.0.00.07.0002 - KELURAHAN MASIGIT	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				239.200.000,00		243.984.000,00		248.863.680,00		253.840.954,00		253.840.954,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Capaian Kinerja Kooordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	8	239.200.000,00	8	243.984.000,00	8	248.863.680,00	8	253.840.954,00	8	253.840.954,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				239.200.000,00		243.984.000,00		248.863.680,00		253.840.954,00		253.840.954,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	8	239.200.000,00	8	243.984.000,00	8	248.863.680,00	8	253.840.954,00	8	253.840.954,00		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani (%)	100	100	972.800.000,00	100	991.056.000,00	100	1.009.677.120,00	100	1.028.670.663,00	100	1.028.670.663,00	7.01.0.00.0.00.07.0003 - KELURAHAN SUKMAJAYA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				181.600.000,00		185.232.000,00		188.936.640,00		192.715.373,00		192.715.373,00		
Capaian Kinerja Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	8	181.600.000,00	8	185.232.000,00	8	188.936.640,00	8	192.715.373,00	8	192.715.373,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				181.600.000,00		185.232.000,00		188.936.640,00		192.715.373,00		192.715.373,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7	8	181.600.000,00	8	185.232.000,00	8	188.936.640,00	8	192.715.373,00	8	192.715.373,00		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani (%)	100	100	972.800.000,00	100	991.056.000,00	100	1.009.677.120,00	100	1.028.670.663,00	100	1.028.670.663,00	7.01.0.00.0.00.07.0004 - KELURAHAN PANGGUNG RAWI	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				138.400.000,00		141.168.000,00		143.991.360,00		146.871.187,00		146.871.187,00		
Capaian Kinerja Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	8	138.400.000,00	8	141.168.000,00	8	143.991.360,00	8	146.871.187,00	8	146.871.187,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				138.400.000,00		141.168.000,00		143.991.360,00		146.871.187,00		146.871.187,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	8	138.400.000,00	8	141.168.000,00	8	143.991.360,00	8	146.871.187,00	8	146.871.187,00		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani (%)	100	100	972.800.000,00	100	991.056.000,00	100	1.009.677.120,00	100	1.028.670.663,00	100	1.028.670.663,00	7.01.0.00.0.00.07.0005 - KELURAHAN GEDONG DALEM	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				131.200.000,00		133.824.000,00		136.500.480,00		139.230.490,00		139.230.490,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Capaian Kinerja Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	8	131.200.000,00	8	133.824.000,00	8	136.500.480,00	8	139.230.490,00	8	139.230.490,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				131.200.000,00		133.824.000,00		136.500.480,00		139.230.490,00		139.230.490,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	8	131.200.000,00	8	133.824.000,00	8	136.500.480,00	8	139.230.490,00	8	139.230.490,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya harmonisasi antar sektor dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase instansi vertikal dan stakeholder di wilayah kecamatan yang berkolaborasi dengan program pemerintah daerah (%)	0	71	100.000.000,00	72	100.000.000,00	73	100.000.000,00	74	100.000.000,00	75	100.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JOMBANG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	0		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50	50		0		0		0		0			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				19.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50	50	19.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	0	0,00	50	19.000.000,00	50	19.000.000,00	50	19.000.000,00	50	19.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	81.000.000,00	12	81.000.000,00	12	81.000.000,00	12	81.000.000,00	12	81.000.000,00		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BURHANUDIN, SE**

Jabatan : **CAMAT JOMBANG KOTA CILEGON**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ROBINSAR**

Jabatan : **WALIKOTA CILEGON**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 2025

Pihak Kedua,

ROBINSAR

Pihak Pertama,

BURHANUDIN, SE

NIP. 19800121 200312 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pelayanan Berkualitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kecamatan	Skor Penilaian Kecamatan	Poin	70
2	Terwujudnya Kinerja Kecamatan Jombang yang Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	61,30
3	Terwujudnya Kualitas Pembangunan Kecamatan yang Berkelanjutan	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	100

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	17.315.506.349,00
Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.186.000,00
Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.167.379.250,00
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.332.507.000,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.302.000,00
Total Anggaran	**29.921.880.599,00**

Cilegon, 2025

Pihak Kedua,

ROBINSAR

Pihak Pertama,

BURHANUDIN, SE

NIP. 19800121 200312 1 005